



**ANALISIS PENGARUH INVESTASI, INFLASI DAN UPAH
MINIMUM PROVINSI TERHADAP PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO DI PULAU SULAWESI PERIODE
2010-2019**

SKRIPSI

ARMAN ARIFIN

155020101111064

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat
Sarjana Ekonomi**



JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020



Analisis Pengaruh Investasi, Inflasi dan Upah Minimum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Sulawesi Periode 2010-2019

Arman Arifin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: armanarifin27@gmail.com

Pembimbing:

Prof. Dr. Agus Suman, SE., DEA.

Email : agussuman@ub.ac.id

ABSTRAK

Sebagai Negara kepulauan, pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi persoalan yang cukup serius yang dialami Indonesia. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk memakmurkan penduduk daerah atau negara dengan melihat peningkatan output atau dengan melihat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki persoalan yang cukup kompleks dari bidang makroekonomi baik dari segi penyerapan tenaga kerja, modal yang terbatas, inflasi dan pemberian upah minimum yang berdasarkan kehidupan layak. Peningkatan beberapa variabel makroekonomi di pulau Sulawesi seperti investasi, inflasi dan upah minimum provinsi harapannya dapat mempengaruhi peningkatan PDRB sehingga perekonomian di pulau Sulawesi dapat meningkat. Dengan meningkatnya variabel makroekonomi tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, inflasi dan upah minimum provinsi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Pulau Sulawesi Periode 2010-2019. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis data panel dengan menggunakan program Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat PDRB di pulau Sulawesi. Artinya dengan peningkatan inflasi menyebabkan penurunan PDRB di pulau Sulawesi. Investasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di pulau Sulawesi dan juga dalam penelitian ini tidak melibatkan investasi asing yang dari segi jumlah proyek dan nilai investasi lebih tinggi dibanding penanaman modal dalam negeri. Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Hal ini disebabkan karena dengan peningkatan upah maka perusahaan akan melakukan efisiensi tenaga kerja.

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Inflasi Dan Upah Minimum Provinsi



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Pengaruh Investasi, Inflasi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Pulau Sulawesi Periode 2010-2019"


Yang disusun oleh :


Nama : Arman Arifin
 NIM : 155020101111064
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
 Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
 Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya


telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **27 Mei 2020** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. Agus Suman, SE., DEA.
 NIP. 196006151987011001
 (Dosen Pembimbing)
2. Shofwan, SE., M.Si
 NIP. 197305172003121002
 (Dosen Penguji I)
3. Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si
 NIP. 196311161990021001
 (Dosen Penguji II)









Dis. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D
 NIP. 196006151987011001



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

Analisis Pengaruh Investasi, Inflasi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Pulau Sulawesi Periode 2010-2019

Yang disusun oleh :

Nama : Arman Arifin
 NIM : 155020101111064
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
 Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
 Konsentrasi : Sumber Daya

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua Program Studi
 Ilmu Ekonomi



Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D
 NIP. 196006151987011001

Malang, 4 Mei 2020

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Agus Suman, SE., DEA.
 NIP. 196912101997031003



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Arman Arifin**
 Tempat, tanggal lahir : **Polewali, 17 Desember 1996**
 NIM : **155020101111064**
 Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**
 Konsentrasi : **Sumber Daya**
 Alamat : **Jalan Kembang Turi Gang 2 No 27**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Analisis Pengaruh Investasi, Inflasi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Pulau Sulawesi Periode 2010-2019

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Mei 2020

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Agus Suman, SE., DEA. Ph.D

NIP. 196006151987011001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D

NIP. 196912101997031003

Yang membuat pernyataan,



Arman Arifin

NIM.155020101111064

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik	15
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Output	15
2.1.4 Produk Doestik Regional Bruto.	16
2.1.5 Investasi	17
2.1.5.1 Teori Investasi Klasik	18
2.1.5.2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	19
2.1.6 Inflasi	20
2.1.6.1 Teori Kuantitas	22
2.1.7 Ketenaga kerjaan	22
2.1.7.1 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja	23
2.1.7.2 Angkatan Kerja dan Pasar Tenaga Kerja	24
2.1.7.3 Penyerapan Tenaga Kerja	28
2.1.8 Upah Minimum Provinsi	30
2.1.8.1 Upah Berdasarkan Kebutuhan Hidup Minimum Pekerja	31
2.1.8.2 Kebijakan Upah Minimum	32
2.1.8.3 Teori Likuiditas	34
2.1.9 Hubungan Antara Variabel	35



2.1.9.1	Hubungan Variabel Investasi Terhadap PDRB	35
2.1.9.2	Hubungan Variabel Inflasi Terhadap PDRB.....	36
2.1.9.3	Hubungan Variabel UMP Terhadap PDRB	37
2.2	Penelitian Terdahulu	38
2.3	Kerangka Fikir.....	41
2.3	Hipotesis.....	41
BAB III	43
METODE PENELITIAN	43
3.1	Jenis Penelitian	43
3.2	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	43
3.3	Definisi Operasional dan Pengurukan Variabel Penelitian	43
3.3.2	Variabel Independen.....	44
3.4	Jenis dan Sumber Data	44
3.5	Metode Pegumpulan Data.....	45
3.6	Metode Analisi Data.....	45
3.6.1	Penentuan Model Estimasi	47
3.6.2	Penentuan Metode Estimasi.....	48
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	49
3.6.4	Uji Kelayakan Model	51
BAB IV	54
HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1	Gambaran Umum Objek.....	54
4.2	Regresi Data Panel	59
4.2.1	Hasil Uji Chow.....	59
4.2.2	Hasil Uji Hausman.....	60
4.3	Hasil Estimasi	60
4.4.	Hasil Uji Asumsi Klasik	63
4.4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	63
4.4.2	Hasil Uji Autokorelasi.....	63
4.4.3	Hasil Uji Multikolinearitas	64
4.5	Hasil Uji Signifikansi	64
4.5.1	Hasil Uji T.....	64
4.5.3	Hasil Uji Determinasi R-Square	67
4.6	Analisa Ekonomi	67
4.6.1	Pengaruh Antara Investasi Terhadap PDRB.....	67



4.6.2	Pengaruh Antara Inflasi Terhadap PDRB	70
4.6.3	Pengaruh Antara Upah Minimum Provinsi Terhadap PDRB	71
KESIMPULAN DAN SARAN		74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran	75
LAMPIRAN		82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Permintaan Tenaga Kerja Dan Fungsi Produksi.....27

Gambar 2.2 Grafik Produk Marjinal Tenaga Kerja.....29



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pdrb Adhk Pulau Sulawesi Tahun 2010-2019 (Miliar Rupiah).....	2
Tabel 1.2	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Pulau Sulawesi Tahun 2010-2017 (Miliar Rupiah).....	4
Tabel 1.3	Inflasi Pulau Sulawesi.....	6
Tabel 1.4	Upah Minimum Provinsi Pulau Sulawesi.....	8
Tabel 4.1	PDRB Pulau Sulawesi.....	48
Tabel 4.2	Investasi Sulawesi (Miliar Rupiah).....	50
Tabel 4.3	Inflasi Sulawesi (%).....	51
Tabel 4.4	Upah Minimum Provinsi.....	52
Tabel 4.5	Tabel Hasil Uji Chow.....	53
Tabel 4.6	Tabel Hasil Uji Hausman.....	54
Tabel 4.7	Fixed Effect.....	54
Tabel 4.8	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	56
Tabel 4.9	Hasil Uji Autokorelasi.....	57
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikorelasi.....	58



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemakmuran setiap setiap bangsa, maka diperlukannya proses pembangunan sebagai untuk keberlanjutan dalam kehidupab bernegara. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penilain keberhailan pembangunan suatu negara. Menurut Todaro (2000) pengejaran pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral bagi kehidupan ekonomi semua negara saat ini. Salah satu tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan mengukur seberapa besar PDRB yang diperoleh setiap tahunnya. Salah satunya adalah PDRB atas harga konstan yang merupakan suatu nilai tambah suatu barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu. Sehingga untuk meningkatkan pendapatan rill perkapita pembangunan ekonomi adalah upaya-upaya atau usaha yang harus dilakukan oleh setiap Negara, (Suparmoko, 2002). Dengan adanya pembangunan ekonomi harapannya dapat meningkatkan tingkat taraf hidup masyarakat dengan menciptakan usaha kewirausahaan baru dan serta memberikan kehidupan layak sehingga dapat keluar dari kemiskinan.

Begitu halnya dengan Indonesia yang menjadikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi menjadi salah satu unsur pokok untuk mengukur keberhasilan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia berkisar diangka 5%. Berdasarkan hasil dari laporan ketua badan pusat statistic bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai pulau di Indonesia berbeda dengan pulau lainnya.



Pulau Sulawesi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2019 yaitu sebesar 6.44%, lalu pulau Kalimantan sebesar 5.92, pulau Jawa sebesar 5.56%, pulau Bali dan Nusa Tenggara 5.28%, pulau Sumatra 4.49% dan yang terakhir adalah pulau Maluku dan Papua -7.43%. Melihat kondisi tersebut harapannya dengan semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi kontribusi terhadap PDB nasional semakin tinggi karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menandakan bahwa kondisi perekonomian pulau tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Perencanaan perekonomian sangat diperlukan karena sebagai arah bagi proses pembangunan dan juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan sama halnya penting dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk domestic regional bruto (PDRB) di tingkat daerah. Nilai PDRB digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya baik itu dari segi sumber daya alam dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB) perkapita (Zaris, 1987).

Tabel 1.1 : PDRB ADHK PULAU SULAWESI TAHUN 2010-2019 (Miliar Rupiah)

Provinsi	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sulut	51721.33	54910.9	58677.59	62422.5	66360.76	70425.33	74764.66	79485.47	84258.69	89028.05
Sulsel	171740.7	185708.5	202184.6	217589.1	233988.1	250803	269401.3	288814.2	309243.63	330605.1
Sulbar	17183.83	19027.5	20786.89	22227.39	24195.65	25964.43	27524.77	29347.19	31176.59	32873.53
Sultra	48401.15	53546.69	59785.4	64268.71	68291.78	72993.33	77745.51	83001.82	88328.52	69226
Sulteng	51752.07	56833.83	62249.53	68219.32	71677.53	82787.2	91014.56	97474.86	103617.69	27993
Gorontalo	15475.74	16669.09	17987.07	19367.57	20775.8	22068.8	23507.21	25090.34	26722.59	28432.87

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan tentang kondisi PDRB di pulau Sulawesi mengalami peningkatan selama periode 2010-2019. Dapat dilihat nilai



PDRB tertinggi di provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 330605.1 Miliar. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas pusat perekonomian di pulau Sulawesi terpusat di provinsi Sulawesi Selatan karena dari segi industri, penyerapan tenaga kerja, investasi masih terpusat di provinsi tersebut.

Dengan melihat tabel 1.1 diatas dengan PDRB yang setiap tahunnya meningkat harapannya dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDB nasional. Menurut laporan Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi di pulau Sulawesi sebesar 6.44% membuat pertumbuhan ekonomi pulau Sulawesi tertinggi diantara pulau-pulau lainnya, namun kontribusi terhadap PDB nasional masih sangat rendah dibandingkan dengan pulau yang ada di Indonesia yaitu sebesar 6.43% dan jika dibandingkan dengan pulau Jawa dengan pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5.56% kontribusi terhadap PDB nasional terbesar di Indonesia yaitu 59.15% di tahun 2019. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena di pulau Jawa sendiri merupakan pusat perekonomian Indonesia yang dimana terdapat berbagai industry-industri global, pusat bisnis dan lainnya sehingga hal tersebut menyebabkan kesenjangan baik dari segi pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya.

Dalam meningkatkan pertumbuhan output terdapat peran dari investasi terhadap pembangunan ekonomi. Aliran dana sangat dibutuhkan setiap Negara berkembang baik asalnya dari luar negeri maupun dalam negeri sangat diperlukan demi keberlangsungan perekonomian. Oleh karena itu investasi sangat dibutuhkan oleh Negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia terbuka terhadap investasi-investasi yang masuk baik dari investasi asing maupun investasi *domestic*.

Witjaksono (2009) tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk memakmurkan penduduk daerah atau Negara. Sebagai Negara berkembang,



Indonesia menghadap berbagai macam persoalan dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah modal yang sangat terbatas dalam proses pembangunan ekonomi.

Penanaman modal baik modal asing maupun modal domestik bisa dijadikan sebagai salah satu sumber dana dalam menggerakkan perekonomian. Penanaman modal dapat dijadikan untuk menutupi keterbatasan pembiayaan dalam pembangunan ekonomi (Thirafi, 2013).

Sebagian besar Negara-negara berkembang memiliki keterbatasan dana untuk melanjutkan pertumbuhannya, sehingga dibutuhkan investasi dari berbagai pihak. Menurut Jhingan (1996) investasi merupakan sebuah solusi bagi Negara berkembang ataupun keterbelakangan untuk keluar dari keterpurukan ekonomi. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Nurkse (1996) yang menyebutkan bahwa kemiskinan suatu Negara dapat digunting dengan investasi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, Indonesia memerlukan pembiayaan cukup yang berasal dari sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu strategi yang digunakan adalah membuka peluang bagi investor-investor domestic maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk memacu investasi yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal.

Tabel 1.2 : Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Pulau Sulawesi Tahun 2010-2019 (Miliar Rupiah)

Provinsi	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sulut	95.8	331.6	678.5	66.8	83	270.6	5069.6	1488.2	4.32012	7410.1
Sulsel	3212.3	3986.3	2318.9	921	4949.6	9215.327	3334.6	1969.4	3.257876	2640.3
Sulbar	840	218.6	228.6	685.1	690.1	1103.796	84.1	660.2	3114.2	941.1
Sultra	19.2	59	907.3	1261.6	1249.9	2015.402	1794.2	3148.7	1603.4	3645.4
Sulteng	153.6	2620.2	602.8	605.3	95.8	968.4	1081.2	1929.7	8448.9	3080.3
Gorontalo	16.7	11.8	164.9	84.4	45.1	94.306	2202.5	888.4	2666.7	642.7

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020



Penanaman modal dalam negeri merupakan investasi yang menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, sehingga harapannya dengan kegiatan produktif tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat tren investasi dalam negeri di pulau Sulawesi yang mengalami peningkatan tiap tahunnya maka hal ini berarti Sulawesi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB. Tren investasi di pulau Sulawesi fluktuatif, diantara provinsi tersebut, investasi tertinggi pada Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 dan kemudian mengalami penurunan investasi pada 2016-2017 meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2018. Di provinsi Sulawesi Tengah investasi terendah pada tahun 2014 dan kemudian meningkat hingga tahun 2018. Investasi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Jumlah proyek dan nilai investasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan PDRB karena semakin banyak proyek yang dikerjakan dengan nilai yang investasi yang tinggi maka dapat mendorong sektor swasta, rumah tangga dan sektor lainnya sehingga akan menyebabkan peningkatan produ PDRB dan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu perekonomian juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Menurut (Endri 2008), salah satu indikator penting dalam perekonomian karena memiliki dampak yang besar bagi perekonomian adalah inflasi. Menurut Sukirno (2008) menyebutkan inflasi memainkan peran penting karena merupakan masalah utama bagi perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian sehingga memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pelambatan pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari tingginya inflasi sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi menurun



(Sukirno, 2001). Ketidakstabilan Inflasi akan berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh para pelaku ekonomi dan pada akhirnya akan berpengaruh pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Efek negatif dari inflasi yang tinggi akan menimbulkan beberapa efek dan pada akhirnya akan menimbulkan krisis, investasi domestik maupun asing akan menurun, pengangguran meningkat, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada PDRB.

Tabel 1.3 : Inflasi Pulau Sulawesi

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi										
Sulawesi Utara	6.28	0.67	6.04	8.12	9.67	5.56	0.35	2.44	3.83	3.52
Sulawesi Selatan	6.56	2.87	4.41	6.22	8.61	4.48	2.94	4.44	3.5	3.57
Sulawesi Barat	5.12	4.91	3.28	5.91	7.89	5.37	2.23	3.79	1.80	0,76
Sulawesi Tenggara	3.87	5.09	5.25	5.92	7.40	1.64	3.07	2.96	2.55	3.71
Sulawesi Tengah	6.4	4.47	5.87	7.57	8.85	4.17	1.49	4.33	6.46	5.71
Gorontalo	7.43	4.08	5.31	5.84	6.14	4.3	1.3	4.34	2.15	3.37

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Keputusan investor dalam menanamkan investasinya tergantung dari tingkat kestabilan inflasi yang ada di suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan investor untuk berfikir ulang untuk menanamkan modalnya karena tingkat inflasi tinggi menyebabkan ketidakpastian keadaan ekonomi. Dapat dilihat dari tabel 1.2 bahwa inflasi yang terjadi di pulau Sulawesi mengalami tren fluktuatif yang dapat mempengaruhi harga barang secara serentak dan berlangsung lama sehingga minat masyarakat untuk membelanjakan uang semakin menurun. Namun meskipun mengalami tren yang fluktuatif, mayoritas inflasi di pulau Sulawesi melampaui inflasi nasional dengan nilai inflasi tertinggi yang terjadi tahun 2014 yaitu 9.67% di provinsi Sulawesi Utara.



Dalam perekonomian Indonesia terdapat banyak hal yang harus dielesaikan salah satunya adalah pengangguran akibat dari ledakan penduduk yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah provinsi. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah berakibat dengan jumlah angkatan kerja, atau bisa dikatakan jumlah individu yang membutuhkan pekerjaan semakin meningkat. Di era bonus demografi yang dialami oleh Indonesia keterampilan, skill, dan hard skill merupakan bonus bagi tenaga kerja yang sangat dibutuhkan dalam mencari pekerjaan.

Faktor penentu dalam menjalankan proses produksi yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa adalah tenaga kerja. Menurut Simanjutak (1985) tenaga kerja merupakan penduduk yang sedang bekerja, mencari kerja, sudah bekerja. Termasuk didalamnya yang sedang bereskolah, mengurus rumah tangga semua diartikan dalam tenaga kerja karena suatu waktu dapat bekerja. Pada dasarnya, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran adalah upah minimum. Menurut Mankiw dalam Alghofari (2010), yang mempengaruhi besarnya pengangguran adalah tingkat upah yang diberikan, karena hal tersebut dapat mempengaruhi penurunan penawaran tenaga kerja yang ditawarkan oleh perusahaan akibat dari tingginya upah yang berlaku.

Salah satu faktor produksi untuk menghasilkan PDRB ialah tenaga kerja. Salah satu faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa ialah tenaga kerja. Fungsi produksi $Y = F(A, K, L)$ menyebutkan bahwa fungsi output dipengaruhi oleh fungsi input yaitu (K) sebagai capital, dan (L) sebagai labour atau tenaga kerja yang berarti bahwa dengan peningkatan modal dan tenaga kerja akan mengakibatkan peningkatan pada hasil produksi atau output.



Penetapan upah tenaga kerja ditetapkan berdasarkan skill atau keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tersebut. Sedangkan dalam realita di lapangan terdapat perbedaan skill ataupun kemampuan yang dimiliki setiap pencari kerja atau tenaga kerja.

Upah minimum yang ditetapkan memiliki pengaruh terhadap proses produksi, yang artinya berdampak pada nilai PDRB. Dalam system penetapan upah pemerintah provinsi maupun daerah dapat menetapkan sendiri upah yang berlaku sesuai dengan otonomi daerah yang telah berlaku. Jumlah penyerapan tenaga dipengaruhi oleh upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sehingga akan mempengaruhi keseimbangan pada pasar tenaga kerja. Upah merupakan harga yang harus dibayar oleh perusahaan dalam penggunaan tenaga kerja (Mankiw, 2006). Semakin besar upah yang dikeluarkan oleh perusahaan akan memiliki dampak pada penurunan tenaga kerja diperlukan karena kenaikan upah tidak bersifat elastis terhadap permintaan tenaga kerja.

Tabel 1.4 : Upah Minimum Provinsi Pulau Sulawesi

Tahun/Provinsi	Sulut	Sulsel	Sulbar	Sultra	Sulteng	Gorontalo
2010	1000000	1000000	944200	860000	777500	710000
2011	1050000	1100000	1006000	930000	827500	762500
2012	1250000	1200000	1127000	1032300	885000	837500
2013	1550000	1440000	1165000	1125207	995000	1175000
2014	1900000	1800000	1400000	1400000	1250000	1325000
2015	2150000	2000000	1655500	1652000	1500000	1600000
2016	2400000	2250000	1864000	1850000	1670000	1875000
2017	2598000	2435625	2017780	2002625	1807775	2030000
2018	2824286	2647767	2193530	2177052	1965232	2206813
2019	3051076	2860382	2369670	2351870	2123040	2384020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020



Dari table upah minimum menunjukkan besaran upah yang diterima oleh tenaga kerja tiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para pekerja. Namun dalam sisi ketenaga kerjaan dengan peningkatan upah maka perusahaan akan bersifat rasional dengan mengurangi tenaga kerja dan menggantinya dengan tenaga kerja mesin yang dianggap lebih efektif dan efisien hingga akhirnya menyebabkan pengangguran.

Berdasarkan data dan kenyataan di lapangan dengan melihat peningkatan nilai investasi domestic, inflasi dan upah minimum diperlukan penelitian lebih lanjut apakah terdapat pengaruh terhadap nilai PDRB, maka berdasarkan hal tersebut judul pada penelitian ini adalah **“Analisis Pengaruh Investasi, Inflasi dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Sulawesi Periode 2010-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, bahwa diperlukannya sebuah rumusan masalah untuk mengetahui pengaruh dari tiap variabel tersebut.

Sehingga dalam penelitian ini menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh investasi, inflasi dan upah minimum provinsi Terhadap

Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Sulawesi Periode 2010-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka perlu dilakukan penjelasan mengenai tujuan dari penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui pengaruh investasi, inflasi dan upah minimum provinsi terhadap produk domestik regional bruto di pulau sulawesi periode 2010-2019

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini harapannya mampu menambah wawasan terutama dalam kondisi inflasi investasi dan upah minimum provinsi sehingga dapat menjadi acuan atau pendukung bagi peneliti lain yang tertarik dalam meneliti di bidang yang sama
2. Pada penelitian ini harapannya mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah di seluruh provinsi yang ada di pulau Sulawesi sebagai gambaran tentang pengaruh investasi, inflasi dan upah minimum provinsi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Sulawesi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Negara dapat di kategorikan sebagai Negara yang perekonomiannya berkembang adalah ketika pertumbuhan ekonomi di setiap aspek mengalami pertumbuhan. Perekonomian dapat dikatakan meningkat atau mengalami pertumbuhan adalah ketika produksi barang dan jasa mengalami peningkatan (Prathama Rahardja, 2004).

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun daerah dapat dilihat dari nilai PDRB untuk suatu daerah dan PDB untuk Negara. PDB adalah pendapatan dan keseluruhan total nasional dari barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. PDB mencerminkan keadaan ekonomi suatu Negara sedangkan PDRB mencerminkan keadaan atau kondisi perekonomian suatu daerah atau regional tertentu.

Inflasi menjadi salah satu tolak ukur suatu daerah atau Negara dalam menganalisis suatu perekonomian. Inflasi memiliki dampak yang besar bagi perekonomian karena dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian (Endri, 2008). Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan dampaknya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kestabilan inflasi merupakan salah satu syarat bagi (Wahyuni, 2001).

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara ataupun daerah tidak lepas dari peran penting dari investasi. Harrord-Domar menyebutkan bahwa pengeluaran untuk invetasi tidak hanya berpengaruh terhadap permintaan agregat (lewat



proses multiplier), namun juga berpengaruh pada penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi.

Teori Harrod-Domar memberikan peran penting terhadap investasi karena memiliki dua peranan dalam mempengaruhi perekonomian. Pertama, investasi dapat meningkatkan keuntungan, artinya investasi dapat mempengaruhi sisi permintaan. Kedua adalah dengan berinvestasi dapat meningkatkan kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal, yang berarti bahwa investasi dapat mempengaruhi sisi penawaran.

Asumsi dari teori Harrod-Domar menekankan pada sisi investasi baik secara nasional maupun investasi di daerah-daerah tertentu, sehingga pertumbuhan ekonomi yang meningkat dipengaruhi oleh investasi sehingga menyebabkan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto akan ikut meningkat. Di Indonesia sendiri sudah terbentuk suatu lembaga resmi yaitu Penanaman Modal Nasional, karena langkah ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan suatu perekonomian.

Dalam buku Manurung (2001) terdapat beberapa hal yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah :

a. Barang modal

Barang modal memainkan peran penting dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi, sehingga stok barang perlu ditambah melalui investasi. Namun hal tersebut juga harus memperhatikan investasi neto yang harus lebih besar daripada nol agar pertumbuhan ekonomi tercapai. Jika investasi bersifat konstan maka perekonomian mampu memproduksi seperti pada periode sebelumnya.



b. Tenaga kerja

Negara berkembang pada saat ini masih sangat bergantung pada tenaga kerja sebagai faktor produksi yang sangat dominan. Sehingga dalam penambahan tenaga kerja akan meningkatkan output. Namun semakin modern teknologi maka permintaan tenaga kerja akan semakin sedikit karena teknologi khususnya padat modal dianggap jauh lebih efisien daripada penggunaan tenaga kerja manusia

c. Teknologi

Teknologi merupakan faktor yang tidak bisa dihilangkan dalam perekonomian karena semakin maju teknologi yang dipakai dalam proses produksi maka akan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun dalam kenyatannya tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi adalah terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera.

d. Uang

Uang memiliki peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga semakin meningkat uang yang digunakan dalam proses produksi maka semakin tinggi output yang dihasilkan, hal tersebut juga berlaku ketika jumlah uang yang sama maka akan meningkatkan jumlah output selama penggunaan uang tersebut efisien.

e. Manajemen

Dalam mengelola perekonomian modern diperlukan manajemen yang baik dan efisien terutama dalam perekonomian yang mengandalkan mekanisme pasar. Sehingga dengan manajemen yang baik lebih berguna agar setiap output ataupun produksi tepat sasaran.

f. Kewirausahaan

Para pengusaha mempunyai pemikiran bahwa dengan mengkombinasikan input akan menghasilkan barang dan jasa yang untuk



memenuhi kebutuhan masyarakat atau dalam hal ini para pengusaha mampu menciptakan inovasi baru yang dapat menarik konsumen yang menjadi metode pertumbuhan dan modernisasi suatu Negara.

g. Informasi

Pentingnya informasi merupakan syarat agar tidak terjadinya kesalahan informasi akibat dari informasi yang tidak sempurna yang dimiliki, dalam menghadapi pasar persaingan sempurna, informasi yang sempurna menjadi faktor penentu dalam persaingan sempurna. Sebab dalam informasi sempurna maka para pelaku ekonomi dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi yang lebih efisien.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Kaum ekonom klasik berpendapat bahwa terdapat unsur pokok dalam pertumbuhan ekonomi yaitu modal, jumlah penduduk, luas tanah dan kekayaan sumber alam, tingkat teknologi yang digunakan serta jumlah stok barang modal. Dari unsur tersebut kaum ekonomi klasik menitik beratkan pertumbuhan ekonomi bergantung pada jumlah penduduk. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dapat dilihat ketika produksi marjinal meningkat daripada pendapatan perkapita disebabkan oleh kekurangan penduduk. Sehingga pendapatan nasional dan pendapatan perkapita pertumbuhannya semakin lambat.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Output

Dalam kehidupan bernegara, proses produksi menjadi sangat penting dalam keberlanjutan perekonomian, sehingga peran sumber daya manusia menjadi *sentral* dalam proses produksi tersebut, sehingga dapat dikatakan output akan meningkat jika kesempatan kerja juga ikut meningkat, sehingga hubungan

antara kesempatan kerja dan output dapat dilihat berdasarkan rasio kesempatan kerja output dan angka elastisitas kesempatan kerja, Manurung (2001:133).

Kualitas, kuantitas, kesempatan kerja serta tenaga kerja menjadi indikator penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan ekonomi. Dalam teori Arthur Okun, tingkat pengangguran yang minimal (4% per tahun) akan tercapai apabila seluruh kapasitas produksi terpakai (kesempatan kerja penuh atau *full employment*).

Namun terdapat konsekuensi dari hasil pemikiran okun tersebut bahwa Negara harus menjaga perekonomian agar tetap stabil agar dapat tercapai *full employment*. Dalam kehidupan bernegara hal tersebut bukan tidak mungkin tercapai karena suatu perekonomian pasti mengalami kendala-kendala gejolak ekonomi.

$$L = cQ$$

$$\frac{\partial L}{\partial Q} = c$$

Dari persamaan di atas menjelaskan bahwa untuk menambah kesempatan kerja (L) maka output harus bertumbuh (Q), sebab setiap pertambahan output akan menambahkan jumlah kesempatan kerja sebesar c unit. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan positif dari kesempatan kerja terhadap output sebab makin besar nilai c kesempatan kerja yang tersedia akibat bertambahnya 1 unit output akan semakin besar Manurung (2001:134).

2.1.4 Produk Doestik Regional Bruto.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau jumlah



seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 2000). PDRB merupakan salah satu tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor produksi. Peningkatan PDRB di suatu daerah tertentu menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pula, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menarik bagi para investor-investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah atau Negara, peningkatan investor akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

PDRB dibagi atas dua bagian, pertama adalah atas dasar harga konstan dan yang kedua adalah atas dasar harga berlaku. Nilai tambah barang atau jasa yang dihitung berdasarkan tahun berjalan disebut PDRB atas dasar harga berlaku, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan suatu nilai tambah suatu barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun digunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (Sukirno, 2005)

2.1.5 Investasi

Menurut Sukirno (2002) investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal untuk membeli perlengkapan dan barang-barang modal yang kemudian digunakan untuk menambah output produksi barang-barang dan jasa dalam perekonomian. Terdapat beberapa aspek yang

dipengaruhi oleh investasi yaitu tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, prospek ekonomi kedepannya, kemajuan teknologi dan beberapa faktor ekonomi lainnya.

Dalam Mankiw (2003) investasi merupakan pembelian barang-barang yang akan dipergunakan untuk keperluan yang akan datang. Dalam proses pembangunan investasi sangat diperlukan akibat dari keterbatasan modal sehingga dalam kaitannya tersebut investasi dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu *business fixed investment*, *residential investment*, dan *inventory investment*.

Business fixed investment adalah pembelian peralatan dan sarana yang digunakan dalam produksinya. *Residential investment* mencakup pembelian rumah baru baik yang akan ditinggal atau disewakan. Sedangkan *inventory investment* adalah penyimpanan terhadap barang di gudang baik itu bahan baku, peralatan, barang setengah jadi maupun barang yang telah melewati proses produksi sehingga barang tersebut akan mempunyai nilai lebih di masa depan.

2.1.5.1 Teori Investasi Klasik

Kaum ekonomi klasik berpendapat suku bunga yang tinggi memiliki dampak terhadap investasi, sebab akan mempengaruhi keinginan untuk menanamkan modal para investor semakin berkurang akibat dari suku bunga yang tinggi. Begitupun sebaliknya jika suku bunga rendah, minat investor untuk menanamkan modalnya akan semakin meningkat.

Adam Smith beranggapan bahwa harapan dari investasi adalah mendapat keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi dapat merangsang pembangunan ekonomi khususnya dalam pemanfaatan tenaga kerja untuk meningkatkan hasil produksi. Pembangunan ekonomi harapannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.



2.1.5.2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah aktifitas menanamkan modal untuk melakukan usaha dalam Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pelaku-pelaku investor swasta, perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha milik pemerintah dengan menggunakan modal dalam negeri.

Undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal dalam negeri adalah UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

PMDN yang dana yang bersumber dalam dari dalam negeri yang digunakan untuk pembangunan merupakan salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan. Dengan adanya PMDN harapannya dapat menciptakan efisiensi yang produktif bagi produksi dimasa akan datang.

Investasi dibidang barang modal diyakinin dapat eningkatkan penggunaan tenaga kerja dan dapat meningkatkan produksi. Modal dalam negeri merupakan modal yang berasal dari dalam Negara/daerah, perseorangan atau individu, atau badan usaha yang berbentuk maupun tidak berbentuk badan hukum.

Berdasarkan undang-undang no 6 tahun 1958 dan undang-undang no 12 tahun 1970 tentang penanaman modal negeri (PMDN) disebutkan definisi PMDN pada pasal 1 :

- a. Dalam pasal ini disebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara, maupun Swasta Nasional atau Swasta asing yang berdomisili di Indonesia untuk diabdikan kepada pembangunan ekonomi nasional atau daerah.

Yang dimaksud pihak swasta dalam ayat 1 pasal ini adalah terdiri atas perseorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang



berlaku di Indonesia. Pasal 2 yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan “penanaman modal dalam negeri” ialah penggunaan dari pada kekayaan seperti yang disebutkan pada pasal 1, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Menurut W.W Rostow Penanaman Modal Asing (PMA) harusnya hanya bersifat sebagai perangsang pertumbuhan ekonomi sehingga suatu negara seharusnya bertumpu pada kemampuan dalam negeri. Sumber yang dapat diarahkan dalam pembentukan modal ialah kenaikan pendapatan nasional, pengurangan konsumsi, penggalakan tabungan, pendirian lembaga keuangan, langkah-langkah fiscal dan moneter dan lain sebagainya (Sukirno, 2010).

2.1.6 Inflasi

Suatu proses kenaikan harga barang atau jasa dalam suatu perekonomian dapat didefinisikan sebagai inflasi (Sukirno,2008). Setiap Negara maupun daerah mempunyai keberagaman inflasi dan inflasi tersebut berbeda setiap periode berjalan., sehingga setiap kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dapat dikatakan sebagai inflasi (Sunariyah, 2006). Inflasi dalam segi konsumen menyebabkan ketidakmampuan konsumen untuk membeli barang-barang atau jasa akibat dari kenaikan harga dan dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sedangkan inflasi dalam segi produsen atau perusahaan menyebabkan meningkatnya biaya faktor produk.

Kecenderungan kenaikan harga-harga yang terjadi secara terus menerus atau secara keseluruhan dikategorikan sebagai inflasi (Tandelilin, 2010)

. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kekurangan pendapatan riil oleh investor akibat dari kenaikan harga tersebut. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya ketika inflasi suatu daerah atau Negara rendah maka hal tersebut bisa menjadi sinyal positif oleh para investor untuk menanamkan modalnya.

Berikut ini adalah jenis-jenis inflasi menurut Putong (2002) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Inflasi menurut sifatnya

1) Inflasi rendah (*Creeping Inflation*), adalah inflasi yang masih berada dibatas normal yaitu dibawah 10% (<10%).

2) Tingkat Inflasi yang besarnya antara 10-30% per tahun dapatdikategorikan sebagai inflasi menengah (*Galloping Inflation*). Inflasi ini dicirikan dengan kenaikan harga suatu barang atau komoditas seara cepat dan kenaikan harga tersebut relative besar.

3) Tingkat inflasi di atas 100% dapat dikategorikan sebagai inflasi yang tinggi (*Hyper Inflation*) yang dicikan dengan dengan kenaikan harga atau komoditas yang terjadi secara drastis (diatas 100%). Hal tersebut menyebabkan nilai uang merosot dan tidak lagi berguna sehingga masyarakat enggan untuk memegang uang.

b. Inflasi yang dilihat dari penyebabnya yaitu *Demand Full Inflation*. Hal tersebut disebabkan karena adanya permintaan barang yang terjadi secara keseluruhan meningkat, sedangkan produsen sudah berada pada *full employment*. Sesuai dengan hukum permintaan bahwa ketika terjadi permintaan meningkat secara terus menerus maka harga akan meningkat.

c. Inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi ini dapat dibagi atas dua

1) Inflasi domestik (berasal dari dalam negeri) yang disebabkan karena Negara mengalami defisit dalam pembiayaan dan belanja





sehingga pemerintah akan mencetak uang baru untuk menutup defisit tersebut

- 2) Inflasi yang bersumber dari luar negeri, diakibatkan oleh mitra dagang suatu Negara mengalami inflasi yang tinggi, hingga biaya produksi suatu barang akan mengalami peningkatan, dan ketika barang tersebut diekspor maka akan mengalami peningkatan harga jual baik di Negara eksportir maupun importir.

2.1.6.1 Teori Kuantitas

Teori kuantitas dipopulerkan oleh teori klasik. Pandangan pada teori ini bawa terdapat tiga hal yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang sehingga mengakibatkan inflasi : masyarakat bersifat konsumtif (perpindahan uang yang terjadi begitu cepat, yang kedua adalah jumlah uang beredar di masyarakat terlalu banyak, jumlah produksi barang mengalami penurunan secara nasional. teori kuantitas menekankan pada peranan jumlah uang yang menyebabkan terjadinya inflasi.

2.1.7 Ketenaga kerjaan

Masalah ketenaga kerjaan tidak lepas dari pengangguran, faktanya pengangguran menjadi masalah besar bagi tiap Negara, sehingga diperlukan adanya solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu perlu diketahui terlebih dahulu pengertian ketenaga kerjaan, diantaranya :

1. Dalam Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin 2 yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah mereka yang mampu melakukan pekerjaan dengan harapan dapat menuai penghasilan berupa barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2. Menurut Undang-Undang pokok tentang ketenaga kerjaan No.14 tahun 1969 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mereka yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
3. Menurut simanjuntak (1985) menyatakan bahwa angkatan kerja terdiri dari dua golongan, golongan yang bekerja dan golongan yang mengurus rumah. Kelompok yang tidak termasuk angkatan kerja adalah individu yang masih melanjutkan pendidikan atau bersekolah, golongan yang mengurus pekerjaan rumah, dan golongan lain-lain.

Tenaga Kerja = Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja

2.1.7.1 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Peningkatan pengangguran sangat erat kaitannya terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja dan diikuti dengan meningkatnya penawaran pekerjaan yang ditawarkan akan berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran, sebaliknya jika permintaan melebihi dari penawaran tenaga kerja maka akan terjadi peningkatan pengangguran. Dalam konteks ekonomi yang dimaksud dengan permintaan adalah jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk membeli barang atau jasa tersebut pada setiap peluang harga dalam waktu tertentu (Sudarsono, 1990). Hubungan upah terhadap tenaga kerja adalah perusahaan yang bersedia membayar tenaga kerja pada tingkat upah tertentu.

Permintaan tenaga kerja berpengaruh terhadap upah yang bersedia dibayarkan oleh pengusaha atau perusahaan. Ketika masyarakat membelanjakan sebagian uang yang dimiliki berarti masyarakat tersebut mencapai kepuasan



tersendiri (*utility*). Sedangkan pengusaha atau perusahaan mempekerjakan seseorang agar proses produksi tetap berjalan dan dijual kepada masyarakat yang membutuhkan barang tersebut. Sehingga dengan kenaikan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh kenaikan permintaan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Dalam teori (Ehrenberg dan Smith, 1994 dalam Lestari, 2011) menjelaskan bahwa perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi akan mempengaruhi tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan.

Banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan dipengaruhi oleh tingkat upah yang bersedia dibayarkan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja tersebut. Kegiatan perekonomian dan tingkat upah akan mempengaruhi pada permintaan tenaga kerja, sedangkan besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah (Nainggolan, 2009). Penawaran tenaga kerja (*Labor supply*) adalah total pekerjaan yang tersedia oleh perusahaan atau *supplier*. Besarnya penawaran tenaga kerja dapat diartikan sebagai jumlah keseluruhan pekerja yang siap ditampung oleh perusahaan atau *supplier* untuk proses produksi.

2.1.7.2 Angkatan Kerja dan Pasar Tenaga Kerja

Angkatan kerja merupakan masyarakat yang berusia produktif 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan bekerja. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja, punya pekerja namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran dengan batas usia kerja (15 tahun ke atas). Yang tergolong dalam bekerja adalah mereka yang aktifitasnya dapat menciptakan barang atau jasa untuk keperluan selama seminggu atau dengan kata lain mereka yang mencari penghasilan dalam satu minggu dan tidak terputus. Sedangkan pencari kerja merupakan bagian dari





angkatan kerja yang menganggur atau tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan disebut pencari kerja (Subri, 2003).

Pada dasarnya tenaga kerja dibagi atas dua yaitu angkatan kerja (15-64 tahun) dan bukan angkatan kerja. Menurut Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990) angkatan kerja (*labour force*) dibagi atas golongan dua golongan yaitu angkatan kerja yang bekerja dan golongan tidak bekerja (penganggur) atau sedang mencari kerja. Sedangkan golongan yang mengurus rumah tangga, golongan yang bersekolah, dan golongan lain-lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dll disebut sebagai kelompok yang bukan angkatan kerja.

Berikut ini alah kelompok angkatan kerja yang dibagi berdasarkan golongan yaitu:

1. Angkatan Kerja yang Bekerja

a) Adalah mereka yang bekerja selama satu pekan sebelum pencacahan yang sedang melakukan pekerjaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, upah atau keuntungan dan lamanya bekerja yaitu *minimal* selama dua hari.

b) Kelompok yang termasuk angkatan kerja yang bekerja adalah mereka yang tidak melakukan aktifitas untuk mendapatkan penghasilan atau bekerja kurang dari dua hari termasuk yang bekerja sebagai petani-petani dan orang-orang yang bekerja dalam keahlian

2. Angkatan Kerja yang Mencari Pekerjaan

a) Individu yang belum pernah bekerja maupun yang sedang berusaha mencari ataupun mendapatkan pekerjaan.

b) Kelompok yang bekerja pada saat pencacahan sedang mengganggu maupun kelompok yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

c) Kelompok yang di bebas tugaskan dana sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Secara umum, berikut ini adalah beberapa konsep ketenaga kerjaan yang berlaku di masyarakat (Nainggolan, 2009).

1. Penduduk yang berusia kerja (berusia 15 tahun ke atas) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
2. Angkatan Kerja (*labor force*) adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat, atau berusaha terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa, maka yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu bekerja (K) dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan (MP). Angkatan kerja yang masuk kategori bekerja apabila minimum bekerja selama 1 jam selama seminggu lalu untuk kegiatan produktif sebelum pencacahan dilakukan. Mencari pekerjaan adalah seseorang yang kegiatan utamanya sedang mencari pekerjaan, atau sementara sedang mencari pekerjaan dan belum bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu. Penjumlahan angka angkatan kerja dalam bahasa ekonomi disebut sebagai penawaran angkatan kerja (*labour supply*). Sedangkan penduduk yang berstatus sebagai pekerja atau tenaga kerja termasuk ke dalam sisi permintaan (*labour demand*).





3. Bukan Angkatan Kerja (*unlabour force*) adalah penduduk yang berusia (15 tahun ke atas), namun kegiatan utama selama seminggu yang lalu adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Apabila seseorang yang sekolah, mereka bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu, tetapi kegiatan utamanya adalah sekolah, maka individu tersebut tetap termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Mereka yang tercatat lainnya jumlahnya tidak sedikit dan mungkin sebagian besar masuk ke dalam transisi antara sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dalam kategori bukan angkatan kerja (BAK).
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*labour force participation rate*) Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut, yaitu membandingkan angkatan kerja dengan tenaga kerja.
5. Tingkat Pengangguran (*unemployment rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan, yaitu membandingkan jumlah orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan (demand) dan lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam masyarakat. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian dan tingkat upah. Besar penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat employment) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut, sedangkan besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah (Nainggolan, 2009).

2.1.7.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Angkatan kerja menjadi objek vital dalam pertumbuhan ekonomi karena menjadi salah satu roda penggerak dalam perekonomian Negara. Menurut badan pusat statistic (BPS) angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau sedang tidak bekerja.

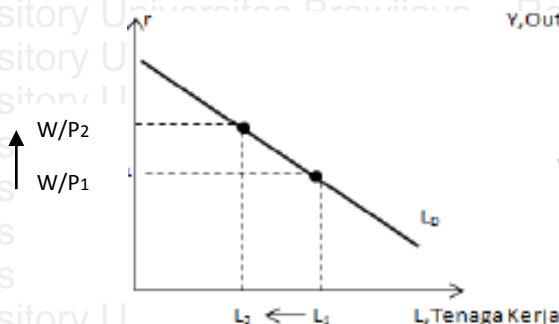
Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi nasional dengan melihat PDB, sedangkan dalam lingkup daerah yaitu melihat PDRB. Dalam fungsi produksi dijelaskan bahwa hubungan antara output (Y) terhadap input (modal dan tenaga kerja) sehingga dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = f(K,L)$$

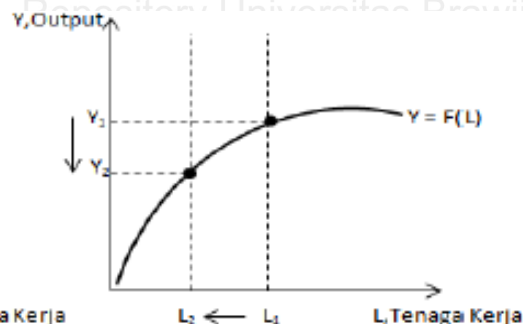
Melihat rumusan tersebut dapat diambil keputusan bahwa investasi (K) dan penyerapan tenaga kerja (L) berpengaruh langsung terhadap PDRB yang dapat dijelaskan dalam gambar berikut

Gambar 2.1 : Permintaan Tenaga Kerja Dan Fungsi Produksi

(a) Permintaan T.K



(b) Fungsi Produksi



Sumber : Mankiw, 2006

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja berhubungan positif terhadap total output yang dilihat dari $(W/P)_1$ ke $(W/P)_2$ namun hal tersebut menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja. Penurunan penyerapan tenaga kerja akan menurunkan output.

Dalam konsep ketenaga kerjaan, penambahan nilai output menjadi hal terpenting dalam menghitung PDRB. Berdasarkan konsep fungsi produksi total $Y=F(K,L)$, output (Y) dipengaruhi dari pertambahan nilai *capital* dan *labour*. Dari sisi tenaga kerja yang mendapatkan upah yang lebih banyak akan menyebabkan peningkatan konsumsi. Dari sisi pemerintahan peningkatan konsumsi masyarakat akan memberikan *multiplier effect* yang akan meningkatkan PPN dari hasil peningkatan daya beli masyarakat sehingga dari peningkatan PPN tersebut yang diterima oleh pemerintah akan meningkatkan PDRB.

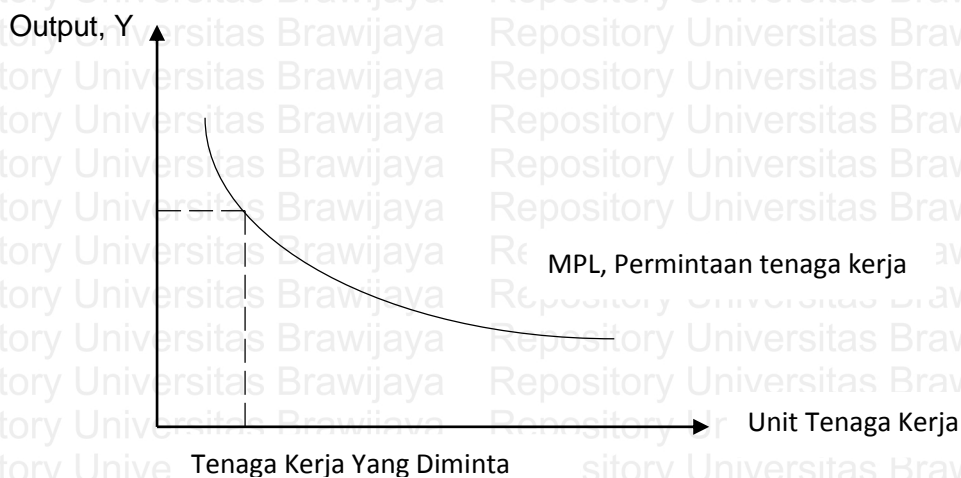
Produk marginal modal dan permintaan modal, pada perusahaan yang menerapkan *profit oriented* yang dimana perusahaan tersebut memaksimalkan laba perusahaan dengan tambahan modal dengan mempertimbangkan jumlah unit tenaga kerja yang digunakan. Dengan mempertahankan jumlah tenaga kerja tetap konstan, produk marginal tenaga kerja merupakan oleh jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari unit modal tambahan.

Dalam penetapan upah minimum provinsi, pemerintah daerah membuat program yang disebut otonomi daerah untuk menetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Hal tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa upah minimum provinsi dapat ditetapkan oleh gubernur.

Penetapan upah minimum provinsi berlandaskan pada tingkat kebutuhan hidup layak (KHL), produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi telah diatur dalam pasal 45 ayat 4.



Gambar 2.2 : Grafik Produk Marjinal Tenaga Kerja



Sumber : Mankiw, 2006

Dilihat dari grafik diatas bahwa permintaan tenaga kerja bergantung pada upah yang mampu dibayar oleh perusahaan. Kurva MPL miring kebawah dikarenakan MPL turun ketika L meningkat (Mankiw, 2006).

2.1.8 Upah Minimum Provinsi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menjelaskan mengenai upah, upah adalah proses balas jasa terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam pengerjaan sesuatu yang mempunyai nilai. Upah diatur dalam undang-undang Ketenaga kerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa pengusaha atau pemberi kerja wajib dan berhak memberikan upah kepada pekerja/buruh sebagai imbalan dari atas balas jasa dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berbicara mengenai upah tentu saja harus ada batasan atau tolak ukur mengenai upah. Sebagai negara berkembang, upah buruh tidak boleh seenaknya ditentukan dengan serendah mungkin (Gie, 1998). Perwujudan penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum atas dasar kebutuhan hidup layak (Sastrohadiwiryono, 2003). Upah paling rendah yang diizinkan untuk dibayar oleh perusahaan kepada para pekerjanya adalah upah minimum (Case & Fair, 2002). Hak setiap pekerja adalah mendapatkan upah yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang dibayarkan oleh perusahaan, pengusaha, pemberi kerja kepada pekerja yang jumlahnya telah disepakati, ditetapkan, atau peraturan perundang-undangan. Jangkauan wilayah upah minimum berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 meliputi :

- a. Upah minimum provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- b. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota.
- c. Upah minimum sektoral provinsi (UMPProp) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di satu provinsi
- d. Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSKab) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah kabupaten/kota.

2.1.8.1 Teori Upah Berdasarkan Kebutuhan Hidup Minimum Pekerja.

Teori ini dipopulerkan oleh ekonom dunia yang sekaligus menjadi salah satu teori tertua dalam penetapan upah yang dipopulerkan oleh Adam Smith. Teori ini berlandaskan bahwa harga suatu kerja “upah” pada hakekatnya adalah pengeluaran kerja. Berdasarkan hal tersebutlah bahwa penetapan upah harus



sesuai dengan kebutuhan hidup pokok pekerja dan orang yang menjadi tanggungjawabnya yang berupa pangan, sandang dan papan.

Para pengikut teori yang dikemukakan oleh Adam Smith ini berpandangan bahwa dengan peningkatan upah akan mempengaruhi peningkatan penduduk.

Peningkatan penduduk berarti semakin meningkatnya penawaran tenaga kerja sehingga berakibat pada penurunan upah yang diberikan. Penurunan tingkat upah sampai di bawah batas minimal kebutuhan hidup akan berpengaruh pada tingkat kesehatan, gizi dan pendidikan keluarga pekerja sehingga layanan jasa yang didapat oleh pekerja akan menurun. Dalam kondisi ini, pekerja terdorong untuk mengurangi jumlah anggota keluarganya dengan cara tidak melakukan pernikahan dini, menggunakan pill kb dan lain sebagainya sebagai faktor ketidak mampunya mencukupi kehidupannya. Begitupula sebaliknya dengan anggota keluarga yang sedikit yang mengakibatkan anggota penurunan penawaran tenaga kerja akan meningkatkan upah pada masa yang akan datang, hal tersebut akan terjadi secara terus menerus.

2.1.8.2 Kebijakan Upah Minimum

Salah satu isu penting yang dihadapi oleh negara modern adalah masalah ketenaga kerjaan. *Goals* dari kebijakan ini adalah mencukupi kebutuhan hidup layak dari pekerja dan keluarganya. Sehingga dengan kebijakan upah minimum harapannya dapat menjamin penghasilan pekerja agar tidak rendah dari tingkat tertentu, untuk meningkatkan produktivitas pekerja, dan mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara produksi yang lebih efisien.

Selanjutnya pada Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan menyebutkan bahwa: (1) upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum

berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Dari semua permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja, permasalahan yang dominan dan pokok adalah upah. Setiap perusahaan sudah mempunyai prediksi mengenai kemungkinan kenaikan upah minimum yang selanjutnya prediksi tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Namun sebagian besar prediksi kenaikan upah yang digunakan oleh perusahaan sangat kecil dan tidak sepadan dengan realita kenaikan upah minimum. Meskipun pemerintah telah mengatur dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan upah minimum, namun dalam kenyataannya dengan dalih tingkat pendapatan perusahaan tidak mampu untuk menaikkan upah para pekerjanya, sehingga dalam kejadian di lapangan masih banyak perusahaan yang membayar para pekerjanya dibawah upah tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpuasan para pekerja.

Dengan penetapan upah minimum yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan, menurut Budiyo (2007) berikut ini adalah beberapa hambatan dalam penetapan upah minimum di dalam pelaksanaannya :

1. Adanya perbedaan tingkat kemampuan dan likuiditas antar perusahaan, meski disebut dengan upah minimum namun ternyata masih ada perusahaan yang sama sekali tidak mampu melaksanakan ketentuan besarnya upah minimum dan apabila dipaksakan akan mengakibatkan penutupan perusahaan (*lock out*).

2. Akibat adanya penetapan upah minimum yang mengharuskan untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh pengusaha, akan memaksa terhadinya putus hubungan kerja (PHK) dikarenakan perusahaan memandang perlu adanya efisiensi tenaga kerja.
3. Pengawasan terhadap pemberlakuan upah minimum tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena adanya faktor pertimbangan demi kelangsungan hidup perusahaan yang ditetapkan oleh pegawai pegawai dinas tenaga kerja dan transmigrasi.
4. Penetapan upah minimum yang terlalu rendah akan menimbulkan gejolak dari kalangan pekerja/buruh dan tidak melindungi kesejahteraan pekerja/buruh namun menguntungkan perusahaan dan meningkatkan daya tarik bagi investor.
5. Penetapan upah minimum yang terlalu tinggi akan memberatkan para pengusaha dan menurunkan daya tarik investor meskipun hal ini sangat menguntungkan pekerja/buruh.
6. Peninjauan besarnya upah minimum setiap tahun sekali mempunyai dampak psikologis bagi pengusaha, karena berpandangan bahwa suatu saat perusahaannya tidak akan lagi mampu beroperasi karena tingginya biaya tenaga kerja.

2.1.8.3 Teori Likuiditas

Likuiditas adalah *indicator* yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban *financial* jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan perusahaannya karena dengan likuiditas yang cukup dapat menjaga hubungan baik dengan pemegang saham. Menurut Kasmir

(2014), likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan.

Menurut Lukman Syamsuddin (2009), likuiditas adalah suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini mengukur pada kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relative terhadap utang lancarnya. (Fahmi, 2011:53).

Menurut Nugroho (2011) likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknyayang segera harus dipenuhi.

2.1.9 Hubungan Antara Variabel

2.1.9.1 Hubungan Variabel Investasi Terhadap PDRB

Menurut Todaro (1981) pembangunan ekonomi suatu negara mempunyai beberapa syarat umum, yang pertama adalah akumulasi modal, modal yang dimaksud dalam hal ini adalah tanah, sumberdaya manusia dan peralatan fisik. Kedua, pertumbuhan penduduk yang dibarengi oleh kemampuan individu dalam skill maupun hardskill. Ketiga adalah kemajuan teknologi. Dengan investasi yang berfokus pada pengembangan sumberdaya manusia akan menambah *skill* keterampilan bagi individu atau dengan kata lain tenaga kerja terebut dapat



tumbuh menjadi individu yang mempunyai *skill* yang memumpuni sehingga dapat memperlancar suatu proses produksi. Menurut sukirno (2010) pertumbuhan ekonomi akan meningkat ketika investasi dilakukan terus menerus oleh masyarakat sehingga akan memperluas peluang kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan pada akhirnya taraf hidup masyarakat meningkat.

Menurut Suryana (2000) Negara berkembang dikatakan kekurangan modal dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama keterbatasan jumlah capital material. Kedua keterbatasan kapasitas dan keterampilan atau *skill* tenaga kerja itu sendiri. Ketiga minimnya investasi netto. Keterbatasan tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya dalam memanfaatkan ketersediaan sumber daya dan sumberdaya manusia yang masih potensial dalam membangun perekonomian. Sehubungan dengan hal tersebutlah investasi memainkan peran penting untuk meningkatkan produktivitas sehingga PDRB suatu daerah dapat meningkat.

2.1.9.2 Hubungan Variabel Inflasi Terhadap PDRB

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terjadi secara *continue* atau terus menerus (Boediono, 1981). Inflasi dapat dikatakan ketika terjadi kenaikan harga barang secara meluas sehingga mengakibatkan sebagian umum dari harga barang maupun lainnya ikut naik. Meningkatnya inflasi di suatu daerah akan menyebabkan penurunan investasi yang pada akhirnya berakibat pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan ikut melemah.

Menurut Harrod-Domar investasi memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lamban akan memberikan efek pada menurunnya produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut teori inflasi klasik, terdapat hubungan antara jumlah uang beredar terhadap inflasi. Semakin banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat maka akan menyebabkan inflasi, sehingga dengan terjadinya inflasi tersebut masyarakat



engganan untuk membelanjakan uangnya karena harga barang dan jasa mengalami kenaikan.

2.1.9.3 Hubungan Variabel UMP Terhadap PDRB

Upah minimum provinsi (UMP) berkaitan langsung terhadap permintaan tenaga kerja. Menurut teori klasik permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh upah riil. Hal tersebut hanya dapat tercapai ketika permintaan tenaga kerja tersebut bersifat homogen. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan permintaan tenaga kerja bersifat sama atau setara tidak dibedakan dengan tenaga kerja yang memiliki tingkat kemampuan tinggi dan tingkat kemampuan rendah (*high skill and low skill*).

Namun dalam kenyataannya adalah dalam pasar tenaga kerja tingkat kemampuan dan keterampilan seseorang berbeda-beda karena dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Tenaga kerja dengan tingkat keterampilan tinggi (*high skill*) dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan karena mempunyai nilai lebih dibanding dengan tenaga kerja dengan keterampilan rendah (*low skill*). Klasifikasi tersebutlah menyebabkan perusahaan akan bersedia membayar dengan upah tinggi terhadap *high skill* dan akan mengurangi permintaan tenaga kerja karena upah tidak bersifat fleksibel terhadap permintaan tenaga kerja dan kesempatan kerja sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja *high skill* maupun *soft skill*, sehubungan dengan hal tersebut upah minimum provinsi tidak berhubungan langsung terhadap produk domestik regional bruto karena dalam kenyataannya hubungan upah minimum provinsi terhadap produk domestik regional bruto melewati berbagai tahap-tahap seperti jumlah penyerapan tenaga ,angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Semakin tinggi upah yang dibayar kepada pekerja maka akan menyebabkan penurunan penyerapan

pekerja yang digunakan sehingga menyebabkan output produksi akan berkurang sehingga mengakibatkan penurunan nilai PDRB suatu daerah.

Mengetahu peningkatan UMP dapat berpengaruh terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja sebagai input produksi (Alatas dan Cameroon 2003), (Neumark dan Washer, 2000) maka kemungkinan hubungan UMP terhadap PDRB berpengaruh negatif. Namun hubungan tersebut dapat berubah ubah disetiap penelitian karena tergantung data dan jumlah tahun yang digunakan dalam penelitian, apakah UMP memiliki efek positif terhadap perekonomian (Cahuc & Michel: 2010) atau memiliki efek *negative* terhadap perekonomian (Kramarz, Lemeiux, dan Margolis: (1997).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah yang ditulis oleh Wiratno Bagus Suryono, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian tersebut variabel PAD, Investasi dan Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap PDRB Jawa Tengah

Fitrah Afrizal dalam judul Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dalam rentang waktu (2001-2011). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan. Namun ketika dilihat dari pengaruhnya, variabel investasi PMDN dan PMA berpengaruh positif sedangkan belanja pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan



Dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia) tahun 2012-2016 yang ditulis oleh Puspasari Windy Astuti menggunakan tehnik analisis regreri data panel. Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah variabel tenaga kerja, penanaman modal asing dan belanja pemerintah Sedangkan variabel Penanaman Modal Dalam Negeri dan ekspor neto tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam jurnal ilmiah mahasiswa Nindi Rahayu Selvia dan Amri dengan judul Analisis Variabel Makroekonomi Aceh tahun 2000-2015. Dengan menggunakan unit analisis regresi linier berganda (OLS), hasil regresi pada penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh *negative* dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Sedangkan variabel PMA dan PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.

Dalam jurnal KBP yang berjudul Analisis pengaruh variabel Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia periode 1997-1998 yang ditulis oleh Fadilla Qurtul Akyun, Antoni, Elva Dona. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda, hasil analisis dapat disimpulkan bahwa inflasi, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam jurnal ilmiah Doni Satria berjudul analisis dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal pertama tahun 1980 sampai kuartal keempat tahun 2006 dengan menggunakan regresi OLS dengan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka pendek antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan dalam jangka panjang terdapat





dampak jangka panjang inflasi yang bersifat non linier terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Aklan Huda Wijaya dan Lama Soelistianingsih pada jurnal Implikasi Upah Minimum Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan menggunakan data panel di 33 provinsi Indonesia tahun 2008-2012 menggunakan metode *fixed effect* diperoleh hasil bahwa upah minimum berpengaruh positif pada PDRB total mayoritas PDRB sektoral.

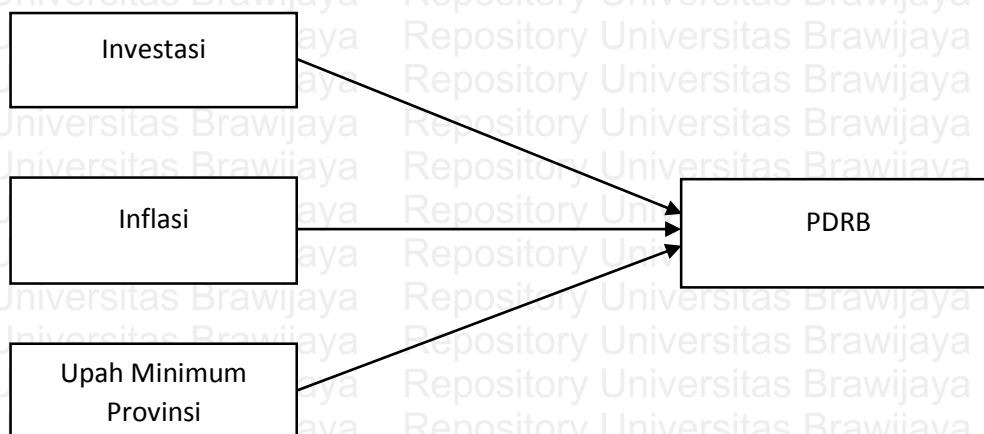
Dalam jurnal Dasri Lokiman, Debby CH. Rotinsulu dan Antpnius Y.Luntungan dengan judul Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Investasi Swasta Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Dampaknya Terhadap PDRB (ADHK) Di Kota Manado Tahun 2003-2012. Dengan menggunakan teknik analisis path dengan hasil yang menunjukkan bahwa upah minimum provinsi dan investasi swasta memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja sedangkan investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja. Besarnya pengaruh upah minimum provinsi ke PDRB melalui tenaga kerja bersifat positif, sedangkan investasi swasta ke PDRB melalui tenaga kerja bersifat *negative*.

Philippe Askenazy, CNRS dan Cepremap dalam penelitian *Minimum Wage, export and Growth* periode 2001-2009 dimana dapat disimpulkan bahwa peningkatan upah minimum pada tenaga kerja *low skilled* akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi namun meningkatkan pengangguran dalam perekonomian terbuka. Dari beberapa penelitian mengenai upah minimum terhadap Pdrb menunjukkan hasil yang berbeda-beda karena disebabkan oleh perbedaan data dan tahun observasi. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa upah minimum provinsi tidak serta merta langsung berpengaruh terhadap PDRB karena dalam kenyataannya melalui berbagai tahap-tahap seperti

penyerapan tenaga kerja, hal tersebut juga sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik.

2.3 Kerangka Fikir

Untuk mempermudah penelitian serta untuk memperjelas alur pemikiran dari penelitian, dibutuhkan kerangka fikir sebagai tolak ukur untuk menghubungkan antar variabel. Berikut adalah kerangka fikir yang akan dibahas pada penelitian ini.



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan awal dari proses berfikir. Menurut Moh. Nazir, (1998:182) yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebuah jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berikut ini adalah hipotesis pada penelitian yang dilakukan :

1. Pengaruh investasi terhadap PDRB

$H_0 : \beta_1 = 0$, yaitu investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat PDRB

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, yaitu investasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB

2. Pengaruh inflasi terhadap PDRB



$H_0 : \beta_2 = 0$, yaitu inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB

$H_1 : \beta_2 \neq 0$, yaitu inflasi berpengaruh terhadap PDRB

3. Pengaruh Upah minimum provinsi terhadap PDRB

$H_0 : \beta_3 = 0$, yaitu Upah minimum provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB

$H_1 : \beta_3 \neq 0$, yaitu Upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap PDRB



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan statistic deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif berfungsi untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data yang telah tersedia secara apa adanya dan tanpa bermaksud untuk menyimpulkan secara umum (Sugiono, 2009:206). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk pengujian teori-teori telah dikemukakan dan disangkutpautkan dengan beberapa variabel-variabel penelitian dengan angka kemudian melakukan analisis statistik. Pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui apakah variabel investasi, inflasi dan upah minimum provinsi berpengaruh terhadap PDRB di pulau Sulawesi.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini periode waktu yang digunakan adalah tahun 2010-2019 dan bertempat di enam provinsi yang berada di pulau Sulawesi.

3.3 Definisi Operasional dan Pengurukan Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 2 jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang dimaksud dengan variabel independen adalah variabel bebas yang menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel lain, sedangkan yang dimaksud dengan variabel dependen adalah variabel yang sifatnya tidak bebas atau terikat yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

3.3.1 Variabel Dependen

Produk Domestik Regional Bruto (Y)

Pada penelitian menggunakan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut pengeluaran pada tahun 2010-2017 yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara merata dan keseluruhan satu daerah tertentu.

3.3.2 Variabel Independen

Investasi (X1)

Investasi pada penelitian ini adalah investasi domestic yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) pada tahun 2010-2019 dalam satuan miliar.

Inflasi (X2)

Kecenderungan kenaikan harga-harga yang terjadi secara *continue* atau secara menyeluruh selama periode 2010-2019 dalam satuan persen (%).

Upah Minimum Provinsi (X3)

Upah minimum dalam penelitian ini dilihat dari satuan rupiah di Sulawesi pada tahun 2010-2019.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang didapat dari hasil publikasi suatu instansi ataupun institusi tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan *polling* data atau data panel. Data panel adalah gabungan dari data individu (rumah tangga, perusahaan, kabupaten/kota, dll) pada sebuah periode tertentu atau dengan kata lain panel data merupakan gabungan data dari *cross section* dan *time series* (Ekanda, 2014). Adapun sumber data pada penelitian ini adalah.

1. Data investasi periode tahun 2010-2019 yang diperoleh dari instansi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Data inflasi periode tahun 2010-2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Data upah minimum provinsi periode tahun 2010-2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
4. Data PDRB atas dasar harga konstan menurut pengeluaran pada tahun 2010-2019 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Alasan penggunaan data *polling* adalah

1. Dengan menggunakan *polling data* maka dapat meningkatkan jumlah observasi, data bersifat informative, lebih variatif, meminimalisir terjadinya kolinearitas antar variabel, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih efisien.
2. *Polling data* memberikan variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan unit variasi yang muncul menurut waktu.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil publikasi suatu instansi terkait, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah publikasi dan kepustakaan. Data dikumpulkan dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal dan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS).

3.6 Metode Analisis Data

Tujuan dari metode analisis data adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (inflasi, investasi dan upah minimum) terhadap variabel terikat (PDRB). Sehingga dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel tersebut menggunakan analisis regresi data panel. Kelebihan dari analisis regresi



data panel seperti yang disebutkan dalam Gujarati (2012) karena mempunyai kelebihan, diantaranya adalah.

1. Meminimalisir atau dapat mengatasi gejala *heterogenitas*.
2. Data panel berfisat lebih efisien karena data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*, informasi data yang lebih beragam, lebih variasi, meminimalisir terhadinya kolinearitas antar variabel.
3. Karena data panel gabungan data dari *time series* dan *cross section* sehingga dapat mempelajari dinamika perubahan yang terjadi.
4. Penggunaan data panel mempunyai kelebihan untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada *cross section* murni atau *time series* murni.
5. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit.
6. Bias yang dihasilkan dapat diminimalkan oleh agregat individu karena data yang diobservasikan lebih bervariasi dari data lainnya.

Untuk menganalisis dari setiap variabel, berikut ini model untuk analisis regresi data panel dalam penelitian ini.

$$\text{PDRB}_{it} = \beta_0 + \beta_1 I_{it} + \beta_2 \text{LNIF}_{it} + \beta_3 \text{LNUMP}_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

βI = Koefisien untuk variabel Investasi

βIF = Koefisien untuk variabel inflasi

βUMP = Koefisien untuk variabel UMP

LN = Log Natural

i = Subjek

t = Periode waktu

e = Error

3.6.1 Penentuan Model Estimasi

Menurut Widarjono (2009) terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel, yaitu Pooling Least Square (*Common Effect*), *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

1. *Pooled Least Square (Common Effect) Model*.

Common effect model (CEM) merupakan model dengan pendekatan paling sederhana yaitu dengan cara menggabungkan seluruh data *time series* dan *cross section*. Pada metode ini tidak memperhatikan dimensi waktu dan individu dan beranggapan bahwa semua perilaku dari individu dan waktu tidak mengalami perubahan.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Metode pendekatan efek tetap atau biasa juga disebut *fixed effect model* merupakan model yang beranggapan bahwa koefisien slope konstan tetapi *intercept* bervariasi antar individu. Pada model ini menggunakan variabel *dummy* untuk mengestimasi terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit maupun lintas waktu.

3. *Random Effect Model (REM)*

Metode ini berfungsi untuk mengatasi kelemahan dari model FEM karena akibat dari penggunaan variabel *dummy* yang mengakibatkan model mengalami ketidakpastian. Variabel *dummy* digunakan untuk mengurangi derajat bebas *degree of freedom (df)* yang nantinya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model ini sering juga disebut *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*

3.6.2 Penentuan Metode Estimasi

Untuk menentukan model yang terbaik dari ketiga model di atas, maka perlu untuk menentukan metode estimasi terlebih dahulu dengan cara melakukan uji F yang terdiri dari uji Hausman test dan uji chow test. Untuk menguji model *commont effect* dan *fixed effect* diperlukan uji chow test lalu kemudian dibuat hipotesis sebagai berikut.

H_0 : *commond effect*

H_a : *fixed effect*

Syarat dalam pengambilan keputusan dalam uji chow test adalah, jika nilai probability F :

1. $F \geq 0,05$ maka H_0 diterima
2. $F < 0,05$ maka H_a diterima

Pengambilan keputusan uji chow test juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan F tabel (Widarjono, 2009).

1. F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak
2. F Hitung $<$ F tabel maka H_a diiterima

Setelah melakukan uji chow, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan uji hausman test yang bertujuan menentukan model terbaik antara model *fixed effect* dan *random effect* kemudian membandingkan kedua model tersebut dengan hipotesis :

H_0 : Menggunakan *random effect*

H_a : Menggunakan *fixed effect*



Berikut ini adalah syarat dalam pengambilan keputusan dalam uji hausman test adalah dengan melihat nilai probability chi-square, jika.

1. Chi-Square $\geq 0,05$ maka menerima H_0
2. Chi-Square $< 0,05$ maka menerima H_a

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal sebelum melakukan analisis data panel, hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai taksiran parameter yang sebenarnya sehingga model tersebut tidak bias, konsiten dan BLUE (*best, linear, unbiased estimator*). Dalam proses tersebut tidak semua langkah dapat dilakukan pada data panel, tergantung dari hasil metode estimasi apakah menggunakan *fixed effect, commond effect*, atau *random effect*. Pada analisis data panel kolinearitas antar variabel terkadang terjadi sehingga kemungkinan kecil terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2012).

Pada regersi data panel, pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil dari pemilihan model terbaik apakah *commond effect* dan *fixed effect* dengan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan *random effect* menggunakan teknik estimasi *Generalized Least Square* (GLS). Dari penjelasan tersebut maka uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan multikolinearitas. Uji normalitas tidak dilakukan karena data least square telah bersifat BLUE, dan juga normalitas tidak dilakukan karena bukan merupakan syarat BLUE. Hal ini sejalan dengan teori Gauss-Markov dalam Gujarati (2009:92-108) menyebutkan bahwa “mengacu pada asumsi CLRM (*classical linear regression model*) estimator kuadrat kecil atau *least square* berada pada kelompok estimator-estimator yang linear dan tidak bias, memiliki varians minimum, sehingga dalam hal ini estimator tersebut adalah BLUE”



1. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas sering terjadi pada data *cross section* karena terdapat berbagai objek pengamatan yang merupakan suatu konsekuensi dalam menggunakan data *cross section*. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Terdapat berbagai cara dalam melakukan uji heteroskedastisitas yaitu uji grafik plot antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan residual (SREID) yang ditandai dengan pola pada titik tersebut bergelombang kemudian mengecil. Uji glejser juga dapat digunakan yaitu dengan cara meregresikan variabel independen dengan absolute residual dengan pengambilan keputusan jika $obs \cdot R\text{-squared}$ lebih dari 0,05 maka tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas.

2. Uji Autokorelasi

Korelasi dibagi atas dua, pertama korelasi antar variabel, kedua korelasi antar periode waktu. Jika terjadi korelasi di atas vif antar variabel maka terjadi multikorelasi. Sedangkan jika terjadi korelasi yang kuat antar periode waktu dapat mengakibatkan autokorelasi. Menurut Ghazali (2011:111) menyebutkan autokorelasi berujung untuk mendecketsi kesalahan pengganggu pada periode waktu (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode waktu sebelumnya (t-1). Umumnya masalah autokorelasi terdapat pada data *time series*, berarti kondisi sekarang dipengaruhi oleh waktu lalu.

Salah satu cara untuk mendeteksi terjadinya korelasi antara variabel adalah dengan cara uji F test yang akan menghasilkan *statistic* Breusch-Godfrey dengan cara meregresi variabel pengganggu residual U_t menggunakan *autoregressive* model dengan orde p :



$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + \varepsilon_t$$

Dengan hipotesis H_0 adalah $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$ dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Hal tersebut juga dapat dilihat dengan melihat nilai *Obs*R-Square* jika lebih kecil dari taraf nyata 5% maka dapat disimpulkan terdapat autokorelasi. Begitu pula ketika nilai pada tabel *Obs*R-Square* lebih besar dari taraf nyata 5% maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

3. Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas berfungsi untuk mengetahui hubungan atau korelasi variabel dependen yang digunakan terhadap variabel independen lainnya. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dalam uji multikoleniaritas perlu memperhatikan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil analisis data. Jika $VIF > 10$ maka terdeteksi gejala multikoleniaritas antara variabel independen lainnya. Begitupun juga ketika $VIF < 10$ maka variabel independen terbebas dari gejala multikoleniaritas.

3.6.4 Uji Kelayakan Model

a. Uji T-Statistik

Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen maka diperlukan uji T-Statistik, atau juga dapat dikatakan bahwa uji T-Statistik dilakukan untuk mengetahui apakah setiap perubahan pada masing-masing variabel independen (inflasi, investasi, dan upah minimum) dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen (PDRB) secara nyata. Berikut ini adalah hipotesis uji t-statistik:

1. Pengaruh Investasi terhadap PDRB

$H_0 : \beta_1 = 0$, yaitu variabel investasi tidak berpengaruh terhadap PDRB secara parsial

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, yaitu variabel investasi berpengaruh terhadap PDRB secara parsial

2. Pengaruh inflasi terhadap PDRB

$H_0 : \beta_2 = 0$, yaitu inflasi tidak berpengaruh terhadap PDRB secara parsial

$H_1 : \beta_2 \neq 0$, yaitu variabel inflasi berpengaruh terhadap PDRB secara parsial

3. Pengaruh upah minimum provinsi terhadap PDRB

$H_0 : \beta_3 = 0$, yaitu variabel upah minimum provinsi tidak berpengaruh terhadap PDRB secara parsial

$H_1 : \beta_3 \neq 0$, yaitu variabel upah minimum provinsi berpengaruh terhadap PDRB secara parsial.

Dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05 ($\alpha=5\%$) dan derajat kebebasan atau *degree of freedom* (df) sebesar (n-k), dengan ketentuan pengambilan keputusan jika t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (tidak signifikan). Jika t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (signifikan).

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetes apakah model yang digunakan sudah layak atau tidak layak. Untuk pengambilan kesimpulan, uji f simultan mengambil dua kesimpulan, jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} , maka model tersebut tidak valid, begitupun sebaliknya jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka model tersebut dikatakan valid. Model dapat dijadikan model analisis struktural ketika model tersebut valid, begitupun sebaliknya, model tidak dapat dijadikan analisis structural ketika model tersebut tidak valid. Berikut ini adalah hipotesis dalam uji F sebagai berikut.

1. Nilai Sig F-statistik $< 0,05$, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Nilai Sig F-statistik $> 0,05$ variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi berfungsi dalam mengecek seberapa besar pengaruh dari variabel bebas (investasi, inflasi, upah minimum provinsi) terhadap variabel dependen (PDRB). Dari uji koefisien determinasi dapat peneliti dapat menyimpulkan bahwa apakah model yang digunakan sudah baik atau belum dengan cara melihat nilai (R-Square = 0) berarti nilai dari variabel terikat (PDRB) tidak mampu diterangkan oleh variabel bebas (investasi, inflasi dan upah minimum). Berbeda dengan ketika nilai R-Square = 1 berarti nilai dari variabel terikat (PDRB) dapat diterangkan oleh variabel bebas (investasi, inflasi dan upah minimum). Sehingga dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa R-Square baik adalah ketika nilai R tersebut berada diantara nilai 0 sampai dengan 1.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek

Pulau Sulawesi atau juga dikenal dengan *celebes* adalah salah satu pulau yang terletak di Indonesia yang merupakan pulau terbesar ke sebelas di dunia. Di sebelah timur pulau Sulawesi terdapat pulau Kalimantan, sebelah Selatan Mindanao, kepulauan sulu Filipina dan di sebelah barat kepulauan Maluku. Dengan luas yang mencapai 174.600km² pulau Sulawesi mendapatkan predikat ke empat sebagai pulau terbesar di Indonesia. Dilihat dari letak geografis pulau Sulawesi terletak di koordinat 2°08' LU serta 170°17' BT. Bentuk pulau Sulawesi dapat dikatakan unik karena menyerupai huruf K dalam alphabet, dengan keunikan tersebut pulau Sulawesi dikelilingi tiga teluk yang membagi semenanjung di Sulawesi, teluk tomini, teluk tolo dan teluk bone.

Dalam pembagian provinsi, pulau Sulawesi terbagi atas enam provinsi dan dalam peneliti menjadikan enam provinsi tersebut sebagai objek penelitian. Enam provinsi tersebut adalah provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Tabel 4.1 : PDRB ADHK Pulau Sulawesi

	Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi											
Sulawesi Utara		51721.33	54910.9	58677.59	62422.5	66360.76	70425.33	74764.66	79485.47	84258.69	89028.051
Sulawesi Selatan		171740.74	185708.47	202184.59	217589.13	233988.05	250802.99	269401.31	288814.17	309243.63	328664.21
Sulawesi Barat		17183.83	19027.5	20786.89	22227.39	24195.65	25964.43	27524.77	29347.19	31176.59	32873531.52
Sulawesi Tenggara		48401.15	53546.69	59785.4	64268.71	68291.78	72993.33	77745.51	83001.82	88328.52	69226
Sulawesi Tengah		51752.07	56833.83	62249.53	68219.32	71677.53	82787.2	91014.56	97474.86	103617.69	27993
Gorontalo		15475.74	16669.09	17987.07	19367.57	20775.8	22068.8	23507.21	25090.34	26722.59	28432.87

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 4.1 menjelaskan tentang pertumbuhan PDRB di enam Provinsi yang ada di pulau Sulawesi. Dalam sepuluh tahun terakhir PDRB terus mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, terkhususnya PDRB atas dasar harga konstan, hal tersebut dapat diartikan bahwa provinsi-provinsi di pulau Sulawesi dalam segi produksi mengalami kenaikan. Pertumbuhan PDRB yang tiap tahun mengalami kenaikan tersebut melambungkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi dapat diartikan cukup baik. Dari keenam provinsi tersebut, PDRB tertinggi yaitu di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 sebesar 328.7 Miliar. Untuk sektor terbesar dalam penyumbang pembentukan PDRB provinsi Sulawesi Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu 13,941 juta dan kemudian sektor industry pengolahan yaitu sebesar 10,808 juta. Sedangkan sumbangan PDRB terendah yaitu provinsi Gorontalo sebesar 15475.74 Miliar pada tahun 2010.

Peluang investasi di pulau Sulawesi terbilang cukup menjanjikan dikarenakan dari segala sektor baik dari pariwisata, sumber daya alam yang melimpah, pertanian dan perkebunan yang luas yang masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah setempat. Disisi lain letak pulau Sulawesi berada di tengah - tengah Indonesia sehingga mendapatkan keuntungan geografis. Dari segi lahan, di pulau Sulawesi tergolong dalam ketersediaan lahan yang *relative* luas yang belum banyak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan investasi besar - besaran dan harga lahan di Sulawesi terbilang *relative* lebih terjangkau dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Di bidang perkebunan, sebagian besar provinsi di Sulawesi menjadi pengekspor handal yang meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional, sehingga menjadikan pulau Sulawesi menyumbang sebanyak 70% pengekspor kakao terbesar di Asia Tenggara.



Tabel 4.2 menggambarkan tingkat investasi di setiap provinsi pulau Sulawesi yang dalam penelitian ini menjadi variabel independen X1. Dalam penelitian ini Investasi yang digunakan adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau investasi *domestic*.

Tabel 4.2 : Investasi Sulawesi (Miliar Rupiah)

Provinsi	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sulut	95.8	331.6	678.5	66.8	83	270.6	5069.6	1488.2	4.32012	7410.1
Sulsel	3212.3	3986.3	2318.9	921	4949.6	9215.327	3334.6	1969.4	3.257876	2640.3
Sulbar	840	218.6	228.6	685.1	690.1	1103.796	84.1	660.2	3114.2	941.1
Sultra	19.2	59	907.3	1261.6	1249.9	2015.402	1794.2	3148.7	1603.4	3645.4
Sulteng	153.6	2620.2	602.8	605.3	95.8	968.4	1081.2	1929.7	8448.9	3080.3
Gorontalo	16.7	11.8	164.9	84.4	45.1	94.306	2202.5	888.4	2666.7	642.7

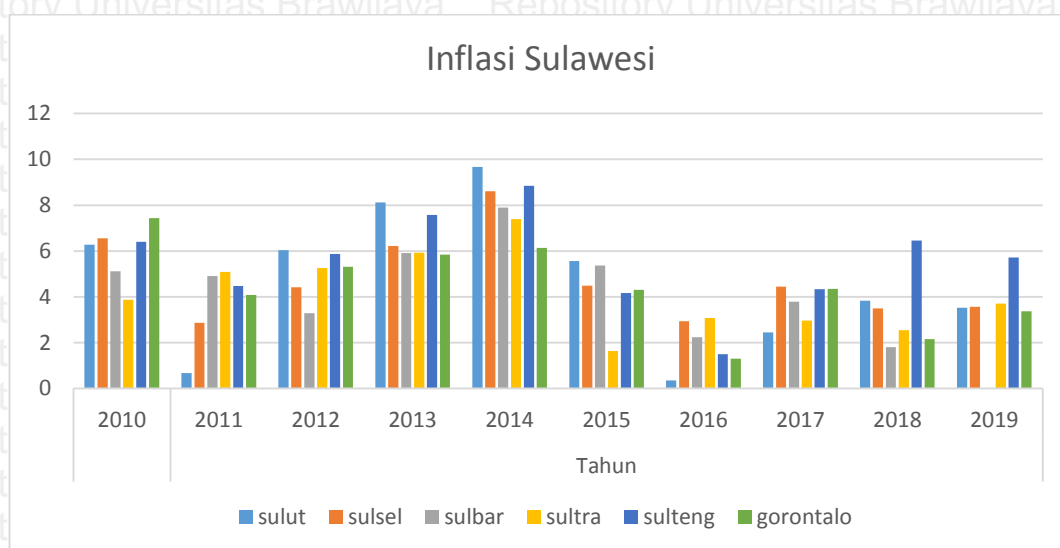
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 4.2 di atas dapat dilihat PMDN di tiap – tiap provinsi di Sulawesi terus mengalami kenaikan tiap tahunnya dan tingkat investasi tertinggi pada tahun 2015 dengan jumlah 9251.327 miliar rupiah, dan PMDN terendah di provinsi Gorontalo pada tahun 2010 yaitu 16.7 Miliar. Namun dari jumlah proyek nilai investasi PMDN lebih sedikit jika dibandingkan dengan PMA di pulau Sulawesi selama periode penelitian. Hal tersebut dapat menyebabkan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat karena dalam penelitian ini PMA tidak dimasukkan dalam variabel bebas. Investasi di daerah sangat penting untuk keberlangsungan dan pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Dari banyaknya jumlah proyek dan jumlah investasi dapat disimpulkan bahwa investasi baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dapat mempengaruhi pertumbuhan output di suatu daerah.

Dalam kehidupan bernegara, dampak yang diberikan oleh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar. Tabel 4.3 menggambarkan tingkat inflasi yang

terjadi di tiap provinsi pulau Sulawesi dari tahun 2010-2019. Inflasi menggambarkan tinggi rendahnya harga suatu barang secara umum yang juga akan berpengaruh terhadap faktor-faktor produksi lainnya, semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin sulit mendapatkan suatu barang dikarenakan kenaikan harga tersebut. Berikut ini adalah gambaran inflasi (%) di pulau Sulawesi.

Tabel 4.3 : Inflasi Sulawesi (%)

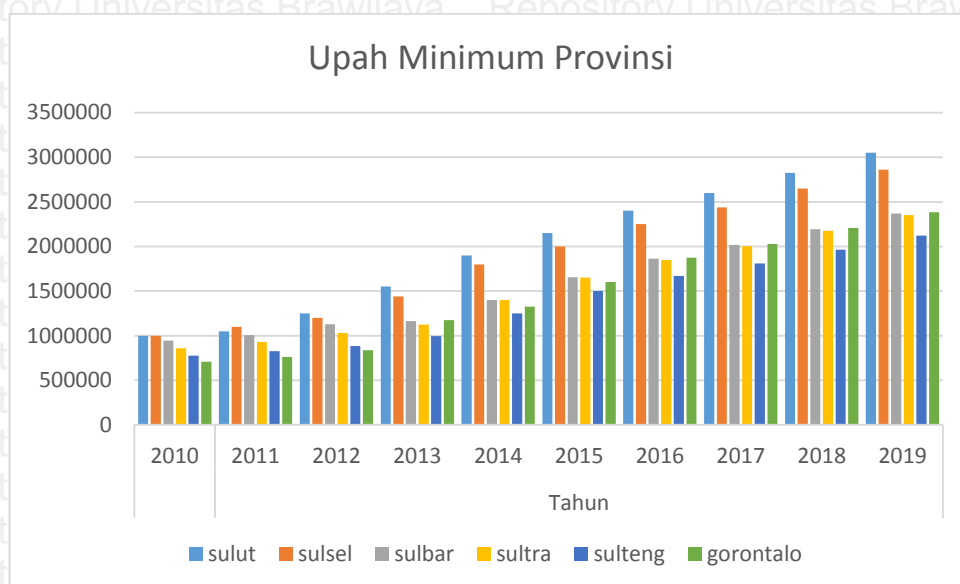


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 4.3 menjelaskan perkembangan inflasi tiap provinsi di Sulawesi mempunyai tren yang fluktuatif. Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 dengan inflasi yang tertinggi selama periode penelitian yaitu sebesar 9.67% dan kembali turun di tahun berikutnya yaitu sebesar 5.56%. Inflasi terendah juga terjadi di provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 yaitu menyentuh angka 0,35% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya inflasi sebesar 2,44%. Inflasi yang terjadi di pulau Sulawesi meskipun kategori rendah (2-10%) namun inflasi di sulawesi melampaui inflasi nasional selama periode penelitian. Besaran inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat menjadi menurun.

Tabel 4.4 menggambarkan besaran Upah Minimum Provinsi di pulau Sulawesi pada tahun 2010-2019 dalam satuan rupiah. Tingkat upah yang diberikan berdasarkan Kebutuhan Kehidupan Layak (KHL).

Tabel 4.4 : Upah Minimum Provinsi



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 4.4 di atas menjelaskan besaran upah minimum provinsi (UMP) tiap tahun mengalami kenaikan di tiap provinsi. Hal tersebut berdasarkan tingkat hidup layak tiap tahun mengalami kenaikan berdasarkan tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) yang berbeda tiap tahunnya. Dari tabel diatas UMP tertinggi yaitu di tahun 2019 di provinsi Sulawesi Utara dengan besaran 3.051.076 rupiah dengan kenaikan 8.03% dari tahun sebelumnya. Dengan peningkatan tersebut menjadikan provinsi Sulawesi Utara sebagai upah tertinggi di pulau Sulawesi dan ke tiga di Indonesia, yang pertama adalah DKI Jakarta lalu yang kedua adalah Papua. Di tahun yang sama UMP terendah terdapat di provinsi Sulawesi Tengah dengan besaran 2.123.040 rupiah.

4.2 Regresi Data Panel

Terdapat tiga pendekatan dalam penentuan metode terbaik dalam sebuah model data panel dapat dilakukan melalui, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Setelah melakukan ke tiga uji tersebut, langkah selanjutnya adalah dengan menentukan metode terbaik yaitu dengan cara melakukan uji chow test dan uji hausman test.

4.2.1 Hasil Uji Chow

Uji chow merupakan langkah awal dalam pemilihan model dari *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* dengan cara melihat nilai probabilitas chi-square. Berikut ini adalah hipotesis uji chow.

$H_0 > 0,05$ berarti menggunakan *Common Effect Model*

$H_1 < 0,05$ berarti menggunakan *Fixed Effect Model*

Tabel 4.5 : Tabel Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Pool: PDRB				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	6.677109	(5,51)	0.0001	
Cross-section Chi-square	30.214229	5	0.0000	

Sumber : Eviews 9, 2020

Dari hasil tabel uji chow di atas dengan melihat nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* yaitu sebesar 0,0000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis H_1 karena ($0,0000 < 0,05$). Dengan menerima hipotesis H_1 berarti dalam uji chow dengan keputusan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

4.2.2 Hasil Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian kedua setelah dilakukan uji chow dalam analisis data panel. Dengan tujuan untuk memilih model terbaik digunakan antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Mode* (REM) dengan melihat nilai probability. Berikut ini adalah hipotesis uji hausman.

$H_0 > 0,05$ Menggunakan *Random Effect*

$H_1 < 0,05$ Menggunakan *Fixed Effect*

Tabel 4.6 : Tabel Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Pool: PDRB				
Test cross-section random effects				
Test Summary				
		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		24.911774	3	0.0000

Sumber : Eviews 9 Diolah, 2020

Dari hasil tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hipotesis H_1 diterima karena nilai probability lebih kecil dari 0.05 ($0,0000 < 0,05$) sehingga dalam penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*.

4.3 Hasil Estimasi

Pada pengujian sebelumnya menghasilkan bahwa dalam pemilihan model terbaik dalam penelitian ini adalah menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*.

Berikut ini adalah hasil estimasi menggunakan model *Fixed Effect*

Tabel 4.7 : Fixed Effect

Dependent Variable: PDRB?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 06/01/20 Time: 20:47				
Sample: 2010 2019				
Included observations: 10				
Cross-sections included: 6				
Total pool (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IV?	0.058445	0.04062	1.438827	0.1563
LOGIF?	-0.4211	0.197447	-2.13274	0.0378
LOGUMP?	0.22159	0.399609	0.554516	0.5816
Fixed Effects (Cross)				
_SU—C	-0.0865			
_SS—C	1.227473			
_SB—C	-0.34156			
_STR—C	0.00886			
_ST—C	0.220849			
_G—C	-1.02912			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.521199	Mean dependent var		11.08632
Adjusted R-squared	0.446093	S.D. dependent var		1.169566
S.E. of regression	0.870449	Akaike info criterion		2.697866
Sum squared resi	38.64176	Schwarz criterion		3.012018
Log likelihood	-71.936	Hannan-Quinn criter.		2.820748
F-statistic	6.9395	Durbin-Watson stat		1.507061



Prob(F-statistic)	0.000004		
-------------------	----------	--	--

Sumber : Eviews 9, diolah 2020

Dari hasil dari persamaan data panel dapat menjelaskan bahwa pengaruh dari setiap variabel-variabel bebas yaitu Investasi (IV), Inflasi (IF), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap variabel terikat yaitu Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = 8.058689 + 0.058445\text{IV} - 0.421104\text{IF} + 0.22159\text{UMP}$$

Hasil dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Investasi (IV)

Pada variabel investasi dalam penelitian ini memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0.058445 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1% pada variabel terikat yaitu investasi, maka akan menaikkan produk domestic regional bruto sebesar 0.058445%

b) Inflasi (IF)

Pada variabel inflasi dalam penelitian ini memiliki koefisien *negative* yaitu sebesar -0.421104 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1% pada variabel terikat yaitu inflasi, maka menyebabkan penurunan nilai produk domestic regional bruto sebesar 0.421104%

c) Upah Minimum Provinsi (UMP)

Pada variabel UMP dalam penelitian ini memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0.22159 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1% pada variabel terikat yaitu UMP, maka menyebabkan menaikkan nilai produk domestic regional bruto sebesar 0.22159%.



4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji white, pengambilan keputusan dengan melihat $obs \cdot R^2$ dan nilai chi square yang ketika nilai chi square $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 4.8 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.391460	Prob. F(9,50)	0.9336
Obs*R-squared	3.949473	Prob. Chi-Square(9)	0.9147
Scaled explained SS	51.39278	Prob. Chi-Square(9)	0.0000

Sumber : Eviews 9 Diolah, 2020

Dengan melihat nilai Prob chi square ($0.914 > 0.05$) maka kesimpulan dari uji heteroskedastisitas ini adalah tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

4.4.2 Hasil Uji Autokorelasi

Pada data *time series* masalah autokorelasi sering terjadi sehingga diperlukan uji autokorelasi guna untuk mengetahui kesalahan pengganggu pada periode waktu (T) terhadap periode waktu sebelumnya (t-1). Berikut ini adalah hasil dari uji autokorelasi dengan menggunakan uji LM test.

Tabel 4.9 : Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.047823	Prob. F(2,54)	0.9533
Obs*R-squared	0.106086	Prob. Chi-Square(2)	0.9483

Sumber : Eviews 9 Diolah, 2020

Melihat nilai $obs \cdot R^2 >$ dari nilai Prob chi square ($0.9483 > 0.05$) sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi.

4.4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolerasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antara variabel independen (investasi, inflasi dan upah minimum) terhadap independen lainnya. Dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil analisis data. Jika $VIF > 10$ maka terjadi persoalan multikolinearitas antara variabel bebas lainnya. Sedangkan jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas lainnya.

Tabel 4.10 : Hasil Uji Multikorelaniaritas

Variance Inflation Factors
Date: 04/29/20 Time: 21:39
Sample: 1 60
Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
IFLIT	5.11E+12	6.576038	1.150607
IIT	552530.7	2.199632	1.281916
UMPIT	1.65E+13	1880.936	1.422907
C	3.41E+15	1914.283	NA

Sumber. Eviews 9 Diolah, 2020

Dari tabel 4.10 dapat dilihat centered VIF untuk variabel inflasi investasi dan upah minimum < 10 sehingga dari uji multikolinearitas tidak terdapat gejala multikolinearitas dari variabel bebas lainnya

4.5 Hasil Uji Signifikansi

4.5.1 Hasil Uji T

Dari hasil pengujian data, dapat disimpulkan bahwa variabel investasi dan upah minimum provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (PDRB), yang ditunjukkan pada besarnya nilai probabilitas di atas 0,05, yaitu (investasi = 0.1563), (Ump = 0.5816). Berbeda dengan variabel inflasi yang berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB dengan nilai probabilitas lebih

kecil dari alpa ($0.0378 < 0.05$). Dari hasil tersebut yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a) Secara parsial variabel investasi berpengaruh positif ditandai dengan melihat nilai t hitung yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel terikat (PDRB) karena nilai signifikansi Investasi sebesar 0.1563 (lebih besar dari alpha 5% atau 0,05).
- b) Variabel Inflasi secara parsial atau individu berpengaruh *negative* dengan melihat nilai t hitung dan nilai signifikansi Inflasi sebesar 0.0378 (lebih kecil dari alpha yaitu 5% atau 0,05), hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel produk domestik regional bruto.
- c) Variabel upah minimum provinsi secara parsial atau individu berpengaruh positif dengan melihat nilai t hitung, dan secara signifikansi nilai signifikansi Upah Minimum Provinsi yaitu 0.5816 ($0.5816 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan secara parsial atau individu variabel Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel produk domestik regional bruto.

Dari hasil interpretasi tersebut, berikut ini adalah hasil persamaan regresi sebagai berikut.

$$\text{PDRB6provSUL} = 0.058445\text{IV6provSUL} - 0.421104\text{f6provSUL} + 0.221590\text{UMP6provSUL}$$

Dengan interpretasi sebagai berikut :

- a) Nilai koefisien Investasi adalah 0.058445, sehingga dapat diartikan setiap investasi mengalami peningkatan sebesar 1% maka nilai PDRB meningkat

sebesar 0.058445% dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi tidak mengalami perubahan.

- b) Nilai koefisien Inflasi sebesar -0.421104, hal tersebut dapat diartikan bahwa nilai inflasi mempunyai hubungan terbalik atau berlawanan arah dengan variabel dependen (PDRB). Dengan nilai yang berlawanan arah tersebut dapat diartikan bahwa setiap kenaikan Inflasi 1% maka nilai PDRB akan mengalami penurunan yaitu sebesar 0.421104% dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi tidak mengalami perubahan.
- c) Nilai koefisien Upah Minimum Provinsi yaitu 0.221590, sehingga dapat diartikan setiap peningkatan Upah Minimum Provinsi 1% maka nilai PDRB meningkat sebesar 0.221590 % dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi tidak mengalami perubahan.

4.5.2 Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model yang digunakan. Dalam pengujian ini mengambil dua kesimpulan, jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka model tersebut dikatakan valid, sebaliknya jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} , maka model tersebut tidak valid, jika valid, maka model tersebut dapat dijadikan model analisis struktural, demikian sebaliknya, jika tidak valid maka tidak dapat dijadikan model analisis struktural.

Dari hasil estimasi dengan melihat nilai Probabilitas (F-statistic) sebesar 0,000004 ($000004 < 0,05$) maka model signifikan 5% dan menolak H_0 . Artinya model layak dan variabel bebas (investasi, inflasi dan upah minimum) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (PDRB).

4.5.3 Hasil Uji Determinasi R-Square

Tujuan dari uji determinasi adalah untuk mengukur persentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Menurut Ghozali (2006) bias yang dimasukkan dalam model merupakan kelemahan mendasar dari koefisien determinasi. Perhitungan dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis yang dirunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi *R-Square*.

Dengan melihat tabel hasil estimasi dapat dilihat bahwa besarnya *Adjusted R-squared* yaitu 0,446093 artinya variabel bebas (Investasi, Inflasi dan Upah minimum provinsi) hanya mampu menjelaskan variabel terikat (PDRB) sebesar 44% sedangkan sisanya yaitu sebesar 56% dijelaskan variabel lain diluar model.

4.6 Analisa Ekonomi

4.6.1 Pengaruh Antara Investasi Terhadap PDRB

Dengan melihat hasil regresi di atas dapat ditarik kesimpulan investasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kenaikan PDRB. Hal tersebut dapat diartikan setiap kenaikan investasi tidak berpengaruh terhadap PDRB provinsi di pulau Sulawesi. Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Teori Harrod-Domar memberikan peran penting terhadap investasi karena memiliki dua peranan dalam mempengaruhi perekonomian. Pertama, investasi dapat meningkatkan keuntungan, artinya investasi dapat mempengaruhi sisi permintaan. Kedua adalah dengan berinvestasi dapat meningkatkan kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal, yang berarti bahwa investasi dapat mempengaruhi sisi penawaran.

Hal-hal yang menyebabkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di pulau Sulawesi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dengan melihat kondisi geografis dan sumber daya ekonomi yang ada, penanaman modal hanya terpusat pada Sulawesi Selatan. Penyebaran investasi tidak merata di seluruh provinsi. Hal tersebut disebabkan ketersediaan infrastruktur, lapangan kerja, sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang tersedia di Sulawesi Selatan lebih lengkap atau lebih memadai dibanding provinsi – provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Hal tersebut membuat penyebaran hasil – hasil pembangunan menjadi tidak merata dan selanjutnya akan berdampak pada tidak meratanya peningkatan PDRB antar provinsi di pulau Sulawesi.
2. Pertumbuhan PMDN bersifat fluktuatif, hal tersebut menandakan kurangnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di pulau Sulawesi. Selain itu tata kelola infrastruktur di pulau Sulawesi masih terpusat di provinsi Sulawesi Selatan sehingga menyebabkan investasi tidak tersebar merata hanya berpusat di provinsi tersebut yang mengakibatkan ketimpangan baik dari segi infrastruktur, pendapatan daerah, dan lain sebagainya.
3. Minimnya investasi di bidang transportasi menjadikan kualitas yang buruk sehingga dapat mengganggu aktifitas ekonomi. Infrastruktur terutama di bidang transportasi menjadi salah satu alasan karena ketika sarana transportasi yang mendukung akan menekan biaya distribusi sehingga menyebabkan perekonomian menjadi efektif dan efisien.
4. Faktor alam tidak dapat dihindari, tiap akhir tahun intensitas curah hujan meningkat sehingga konstruksi yang diperkirakan meningkat justru tumbuh dengan terbatas sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pembangunan sehingga menurunkan jumlah proyek yang dikerjakan di bulan berjalan. Pada tahun 2018 Sulawesi Tengah diguncang gempa yang mengakibatkan tsunami.

5. Jumlah proyek dan nilai investasi PMA lebih besar dibandingkan PMDN.

Melihat berbagai penyebab investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB yang dijabarkan diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” yang menyebutkan bahwa variabel PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena pada hal ini investasi bukan merupakan faktor penentu yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, dan juga penggunaan PMDN untuk pembangunan sering tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan tingkat kepercayaan investor semakin menurun.

Melihat hasil penelitian ini PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Sri Asiyani dengan judul “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur” yang menyebutkan bahwa tata kelola infrastruktur dan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah yang masih kurang baik dan perlu dibenahi kembali. Infrastruktur menjadi kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Infrastruktur, terutama sarana transportasi, yang baik akan menekan biaya distribusi dan mengaktifkan perekonomian. Kritik Keynes terhadap ekonomi klasik, menjelaskan tentang hubungan antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Dalam teori ini penduduk yang terus bertambahakan menyebabkan pendapatan perkapita meningkat. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimum. Karena pertambahan penduduk mengakibatkan pertambahan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang berlaku di Negara Barat disebabkan oleh perkembangan teknologi. (Sukirno,2010).

4.6.2 Pengaruh Antara Inflasi Terhadap PDRB

Dengan melihat hasil regresi data panel di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh secara *negative* dan signifikan terhadap kenaikan PDRB, atau juga memiliki hubungan terbalik terhadap peningkatan nilai PDRB. Yang berarti bahwa setiap kenaikan inflasi maka akan menurunkan nilai PDRB provinsi di pulau Sulawesi karena memiliki hubungan yang negatif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sehingga inflasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Sulawesi periode 2010-2019, salah satunya adalah Inflasi yang terjadi di pulau Sulawesi melampaui inflasi nasional, inflasi tertinggi yang terjadi yaitu di provinsi Sulawesi Utara tahun 2014 dengan nilai tingkat inflasi 9%.

Meskipun laju inflasi di pulau Sulawesi dapat dikatakan laju inflasi yang rendah (2-10%), laju inflasi rendah dapat dikatakan lebih baik karena dengan laju inflasi rendah tersebut maka dapat menjaga kestabilan ekonomi (Sukirno, 2003).

Salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah meningkatnya konsumsi masyarakat di pulau Sulawesi yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan barang atau jasa sehingga memicu inflasi. Peningkatan konsumsi masyarakat di pulau Sulawesi melambangkan bahwa kondisi perekonomian membaik dan tingkat kepercayaan rumah tangga terhadap produsen meningkat. Namun dengan peningkatan konsumsi tersebut menyebabkan kelangkaan barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi.

Hasil yang serupa pada penelitian Satria (2012) dengan judul analisis dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyebutkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang di Indonesia sebaiknya dilakukan dengan cara menjaga inflasi agar tetap stabil dan rendah. Namun hal tersebut juga harus memperhatikan sumber inflasi dalam





perekonomian, baik faktor eksternal (kurs) maupun internal output gap dan fenomena structural.

Hasil yang serupa pada penelitian Selfia (2016) dengan judul analisis variabel makroekonomi aceh yang menyebutkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga pada penelitian Akyun (2015) bahwa inflasi berpengaruh *negative* terhadap PDRB. Inflasi pada Sulawesi sebagian besar disebabkan oleh inflasi pada kelompok transportasi, bahan makanan, perumahan.

4.6.3 Pengaruh Antara Upah Minimum Provinsi Terhadap PDRB

Dengan melihat hasil regresi data panel di atas dapat ditarik kesimpulan upah minimum provinsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan PDRB di enam provinsi di pulau Sulawesi selama periode penelitian. Dalam kenyataannya upah tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan PDRB karena dengan peningkatan upah minimum perusahaan akan bersifat rasional dengan melakukan efisiensi tenaga kerja sehingga menimbulkan putus hubungan kerja dan akan berdampak pada PDRB.

Pengurangan tenaga kerja yang digunakan akan membuat perusahaan mempekerjakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan lebih terlatih sehingga meskipun terjadi pengurangan tenaga kerja, produktifitas perusahaan tetap terjaga sehingga pada penelitian ini upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap peningkatan PDRB. Meskipun besaran upah minimum telah ditetapkan, namun dalam kenyataannya masih banyak sejumlah perusahaan atau pelaku bisnis yang membayar tenaga kerja di bawah upah minimum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan akibat dari ketidakmampuan perusahaan dalam membayar upah tersebut dan jika dipaksa maka akan mengakibatkan penutupan perusahaan (*lock out*). Pemerintah melihat upah merupakan jaring pengaman agar kesejahteraan

pekerja/buruh tidak merosot, disamping untuk meningkatkan penghasilan masyarakat tingkat bawah. Dilihat dari aspek makro tingkat upah mencerminkan pemerataan, tingkat daya beli masyarakat, peningkatan produktivitas nasional yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta memelihara hubungan industrial yang aman. Sehingga dalam penerapannya upah tidak pernah mengalami penurunan karena akan berdampak pada aspek makro tersebut.

Dalam penelitian ini upah minimum tidak berpengaruh terhadap PDRB, hal tersebut sesuai dengan teori permintaan tenaga kerja klasik yang meyakini bahwa upah berpengaruh langsung terhadap permintaan tenaga kerja. Semakin tinggi upah yang diberikan maka perusahaan akan mengurangi tenaga kerja yang digunakan. Berdasarkan laporan dari badan pusat statistik tingkat konsumsi kalori (kkl) dan protein (gram) masyarakat di pulau Sulawesi juga ikut meningkat. Peningkatan jumlah konsumsi merupakan sinyal positif bagi daerah dan juga merupakan efek dari peningkatan upah yang diberlakukan. Dalam Dalam buku Manurung (2001) dituliskan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu teknologi, kewirausahaan, uang, barang modal, tenaga kerja, manajemen dan informasi. Berdasarkan laporan keadaan angkatan kerja provinsi, persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di pulau Sulawesi terbilang cukup tinggi, di tahun 2014 hingga tahun 2017 di provinsi Sulawesi Utara persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja mengalami tren yang fluktuatif dimana di tahun 2014 sebesar 92.45%, di tahun 2015 turun menjadi 90.97%, tahun 2016 sebesar 93,82% dan tahun 2017 sebesar 92,82%. Sedangkan provinsi Sulawesi Selatan persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja adalah 95.20% di tahun 2016 dan menurun hingga periode 2019 yaitu 94.58%.



Dengan hasil upah yang tidak signifikan terhadap PDRB, penelitian ini juga sejalan dengan hasil pada penelitian *Minimum Wage, Exports and Growth* oleh Philippe Askenazy Cnrs dan Cepremap yang pada penelitiannya menyebutkan bahwa upah minimum tidak memiliki dampak yang jelas terhadap pertumbuhan, karena upah memiliki dampak terhadap pertumbuhan khusus untuk negara maju saja dan juga karena upah berkaitan terhadap ekspor.

Melihat hasil penelitian yang menyebutkan bahwa peningkatan upah menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja sehingga menimbulkan putus hubungan kerja sehingga mengakibatkan pengangguran, maka penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dikemukakan oleh John M Abwod dkk dengan judul *Minimum Wages And Youth Employment In France And The United States* tahun 1997 dengan hasil yang menunjukkan bahwa dalam kasus Prancis dengan peningkatan upah 1% dalam upah maka akan mengurangi penyerapan tenaga kerja 2.5%. Begitu juga di Negara Amerika dengan penurunan upah sebesar 1% maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 22%. Hal tersebut dikarenakan bahwa tenaga kerja di Negara Amerika memiliki tingkat kemampuan atau skill *relative* sama (*identic*) dengan tenaga kerja lainnya dan juga tingkat probabilitas tenaga kerja di Amerika lebih tinggi sehingga dengan penurunan upah 1% akan menyebabkan kenaikan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi yaitu 22%.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, penjelasan dan hasil analisis di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Inflasi di pulau Sulawesi diakibatkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat yang juga sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produsen. Namun dengan peningkatan konsumsi tersebut menyebabkan kelangkaan barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi. Berdasarkan jenis inflasi, inflasi yang terjadi di pulau Sulawesi masih tergolong rendah sehingga pemerintah provinsi masih dapat mengontrol perekonomian.
2. Investasi dalam negeri yang terjadi di pulau Sulawesi bersifat terpusat di provinsi Sulawesi Selatan dan juga investasi di pulau Sulawesi bersifat fluktuatif yang mempengaruhi tingkat kepercayaan investor. Hal tersebut disebabkan karena ketersediaan fasilitas, infrastruktur terutama di bidang transportasi, kualitas sumber daya manusia di provinsi tersebut lebih baik dibandingkan di provinsi lainnya sehingga mengakibatkan tidak meratanya pembangunan ekonomi di pulau Sulawesi. Peningkatan investasi di bidang transportasi akan menekan biaya distribusi sehingga menyebabkan perekonomian menjadi efektif dan efisien. Jumlah proyek dan nilai investasi dalam negeri di pulau Sulawesi juga masih di bawah penanaman modal asing.
3. Peningkatan upah yang terjadi mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar tenaga kerja yang digunakan sehingga



dengan peningkatan upah maka perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja yang digunakan dengan cara putus hubungan kerja dan hal tersebut sesuai dengan teori permintaan tenaga kerja klasik. Dengan mempekerjakan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan yang tinggi dan upah yang sesuai sehingga walaupun terjadi putus hubungan kerja, perusahaan masih tergolong produktif karena menggunakan tenaga kerja yang ahli dengan keterampilan tinggi. Peningkatan upah yang terjadi juga menyebabkan peningkatan konsumsi masyarakat yang merupakan sinyal positif bagi daerah dan juga merupakan efek dari peningkatan upah yang diberlakukan.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan dan penelitian yang didapatkan, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupu pihak-pihak lainnya. Adapun saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah provinsi dapat meningkatkan potensi daerah yang dimiliki sehingga menarik para investor untuk menanamkan modalnya di provinsi tersebut dan juga agar investasi tidak terpusat di satu provinsi saja. Untuk meningkatkan kemandirian pemerintah provinsi, sebaiknya tidak bergantung pada investasi asing sehingga ketika terjadi penurunan kepercayaan maka dapat mengandalkan investasi dalam negeri. Peningkatan investasi di tiap provinsi dapat dilakukan dengan cara memperbaiki infrastruktur yang kurang baik terutama bidang transportasi sehingga perekonomian dapat lebih efisien.
2. Harapannya pemerintah provinsi dapat menjaga kestabilan harga dan dapat menjamin ketersediaan barang dan jasa sehingga ketika terjadi



peningkatan konsumsi oleh masyarakat maka tidak menimbulkan inflasi yang berdampak pada perekonomian daerah.

3. Harapannya dengan peningkatan upah minimum pemerintah dapat lebih memperhatikan masyarakat yang terkena imbas dari PHK yaitu dengan cara mengontrol kenaikan harga barang yang terjadi di pasar. Harapan selanjutnya dalam penetapan upah adalah sebaiknya dengan meningkatnya upah diikuti juga dengan peningkatan keterampilan para pekerja sehingga antara pekerja dan perusahaan saling menguntungkan.
4. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penambahan variabel penyerapan tenaga kerja karena pada penelitian ini upah tidak berpengaruh langsung terhadap kenaikan PDRB. Dan juga perlu dilakukan penambahan variabel penanaman modal asing karena mayoritas investasi di pulau Sulawesi sebagian besar adalah penanaman modal asing.



DAFTAR PUSTAKA

Acep

- Abowd, J. M., Kramarz, F., Lemieux, T., & Margolis, D. N. 2000. Minimum Wages And Youth Employment In France And The United States. In Youth Employment And Joblessness In Advance Country (Pp.427-472). University Of Chicago Press
- Askenazy Philippe, CNRS, Cepremap. 2001. Minimum Wage, Export and Growth. Paris.
- Afia Siti Nurul. 2011. *Pengaruh pendapatan asli daerah dan laju inflasi terhadap produk domestik regional bruto tahun 1998 – 2008 menggunakan program minitab 14*. Vol. 5, (No.2) : 52-59.
- Akyun, Fadila Q, Antoni, Eva Dona. 2015. Analisis pengaruh variabel makro ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurnal KBP. Vol.3, (No.1) : 61-73.
- Alatas, V., & Cameron, L.A. (2003). The Impact Of Minimum Wages On Employment In A Low Income Country: An Evaluation Using The Difference-In-Difference Approach (No. 2985). World Bank, East Asia And Pacific Region, Environment And Social Development Sector Unit
- Afrizal Fitrah. 2013. Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011 (Skripsi). Universitas Hasanuddin (ID).
- Astuti Puspasari Windy. 2018. Analisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Vol 6, (No.2) : 1-11
- Asiyan Sri. 2011. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.
- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPF
- Budiyono. 2007. Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka perlindungan Buruh (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro) Semarang.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2020). https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik diakses pada 7 Januari 2020
- Badan Pusat Statistik. 2018. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi 2006-2017. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2019. Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah) Harga Konstan 2010-2018. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2017). Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dan rata-rata Nasional per tahun (Dalam Rupiah), 1997-2016



<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917> diakses pada 8 Januari 2020.

Badan Pusat Statistik. (2019). PDRB Tahunan Sulawesi Selatan <https://sulsel.bps.go.id/statictable/2019/07/04/162/pdrb-tahunan-sulawesi-Selatan-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-2010-2018-miliar-rupiah-.html> diakses pada 14 februari 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2019). Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2010-2019 <https://sultra.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto.html#subjekViewTab3> diakses pada 2 februari 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2019). Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2010-2019 <https://sultra.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto.html#subjekViewTab3> diakses pada 2 februari 2020

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2019). Kondisi Inflasi Kota Mamuju Menurut Bulan 2010-2019 <https://sulbar.bps.go.id/subject/3/inflasi.html#subjekViewTab3> diakses pada 22 februari 2020

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2019). Inflasi Sulawesi Selatan Dan Beberapa Kota 2010-2018 <https://sulsel.bps.go.id/subject/3/inflasi.html#subjekViewTab3> diakses pada 22 februari 2020

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. (2019). Inflasi tahunan Sulawesi Tengah 2010-2018 <https://sulteng.bps.go.id/subject/3/inflasi.html#subjekViewTab3> diakses pada 23 februari 2020

Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. (2019) Inflasi Pulau Sulawesi <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sulbar/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sulawesi-Barat-November-2019.aspx> diakses pada 24 februari 2020

Case, Karl E dan Fair Ray C, 2002. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*, PT.

Cahuc, Pierre, Philippe Michael. 1996. "Minimum wages unemployment and growth". *European economic review* 40(7): 1463-1482.

Endri. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia*. Jakarta. ABFI Institute PERBANAS Jakarta. Prehalindo, Jakarta

Ekanda, Mahyus. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta

Gie, Kwik Kian, 1998. *Gonjang Ganjing Ekonomi Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Gujarati, Damodar. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*, 5th ed. Jakarta Salemba Empat

Kasmir, 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.188.4/616/Sulbar/X /2018 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Lestar, Ayu. 2012. *Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Nilai Incestaso Dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Industry Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Semarang Tahun 1995-2009*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro

Lukman Syamsudin. (2007). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.

Mankiw, N. G., 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mankiw, N. G., 2006. *Makroekonomi*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Munawir, 2011, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kesebelas. Liberti. Yogyakarta.

Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Neumark, David And William Wascher. (1996). "The Effects Of Minimum Wages On Teenage Employment And Enrollment: Estimastes From Matched Cps Data." *Research In Labor Economics* 15: 25-64

Nainggolan, Indra. 2009. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Badan Penerbit Universitas Sumatera Utara Medan.

Putong, Iskandar. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 433 Tahun 2018 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 48 tahun 2017 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 69 Tahun 2018 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 38 tahun 2020 Tentang Usulan Penetapan Upah Minimum



Peraturan Gubernur Nomor 350/15/X/2018 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Provinsi Sulawesi Selatan. Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan <https://sulselprov.go.id/welcome/post/ump-provinsi-sulsel-tahun-2019-sebesar-rp-2-860-382> diakses pada 10 februari 2020

Satria, Doni. 2012. *Analisis Dampak Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Padang (ID). Universitas Negeri Padang.

Selvia, Nindi Rahayu. 2016. *Analisis Variabel Makroekonomi Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.1, (No.2) : 476-485

Simanjuntak, Payaman. 2005. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE-UI

Simanjuntak. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE-Ui

Surat Keputusan Gubernur Nomor: 2877/X/Tahun 2018 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2628/X/Tahun 2017 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Subri, Mulyadi, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Penerbit PT. Salemba, Jakarta.

Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja

Sukirno, Sadono .2008. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : Kencana.

Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sunariyah. 2006. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi 5 Yogyakarta: UPP AMP YKPN



Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Andi. Jakarta

Suryono Wiratno Bagus. 2010. *Analisi Pengaruh PAD Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah*. Semarang (ID). Universitas Diponegoro.

Sastrohadiwiryono, B. Siswanto, 2003. *Manajemen Tenga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Tandellin, Eduarus. 2010. *Portofolio Dan Investasi Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Kanisius

Todaro, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I, Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga.

Todaro, M.P. 1981. *Economic Development in The Third World*, London : Longman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan.

Witjaksono, Mit. 2009. "Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan". JESP, Vol.1, No. 1

Wijaya, A, Lana Soelistianingsi. 2014. *Implikasi Upah Minimum Provinsi Terhadap Produk Domestic Regional Bruto*

Widarjono Ph.D, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasi*. 4rd ed. Yogyakarta: UPP Stim Ykpn

Wiyono, Bambang Budi. 2001. *Statistik Pendidikan: Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Statistik*. Malang: FIP UM.

Zaris, Roeslan. 1987. *Prespektif Daerah dalam Pembangunan Nasional*. LPFE UI. Jakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Rata-Rata Konsumsi Kalori Menurut Provinsi Di Sulawesi 2010-2018

Provinsi	Kalori (kkl)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Utara	2 015.22	1 978.53	1 917.49	1 873.16	1 918.04	2 041.87	2 074.83	2 291.67	2 208.57
Sulawesi Tengah	1 896.25	2 014.43	1 864.43	1 892.44	1 825.40	1 985.74	1 990.21	2 165.32	2 087.03
Sulawesi Selatan	2 056.17	2 078.70	1 957.13	1 921.69	1 896.03	1 995.00	2 040.92	2 209.75	2 183.61
Sulawesi Tenggara	1 926.63	1 927.15	1 891.36	1 820.75	1 829.50	1 992.91	2 034.18	2 131.69	2 125.18
Gorontalo	1 895.67	1 882.41	1 845.55	1 730.83	1 856.27	2 068.46	2 033.02	2 143.18	2 053.45
Sulawesi Barat	2 136.21	1 975.05	1 905.39	1 936.78	1 900.87	1 980.70	2 061.73	2 057.51	2 042.54

Lampiran 2. Rata-Rata Konsumsi Protein Menurut Provinsi Di Sulawesi 2010-2018

Provinsi	Protein (gram)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Utara	56.01	56.43	55.11	54.82	55.59	57.90	58.66	67.42	65.09
Sulawesi Tengah	51.12	54.33	50.20	51.64	50.61	53.36	53.36	59.63	57.90
Sulawesi Selatan	60.03	60.81	57.83	55.20	54.57	55.20	56.96	63.73	63.03
Sulawesi Tenggara	56.31	56.82	55.94	52.91	54.22	55.74	56.97	61.95	62.00
Gorontalo	53.96	52.85	50.45	47.97	51.29	57.19	55.34	60.16	58.98
Sulawesi Barat	59.59	56.11	53.32	54.60	53.24	53.07	55.91	55.41	55.08

Lampiran 3. Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Di Pulau Sulawesi

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Utara	90.39	89.90	92.02	93.21	92.46	90.97	93.82	92.82	93.14	94.63
Sulawesi Tengah	95.39	93.22	96.05	95.81	96.32	95.90	96.71	96.19	96.57	96.46
Sulawesi Selatan	91.63	91.87	93.99	94.90	94.92	94.05	95.20	94.39	94.66	94.58
Sulawesi Tenggara	95.39	95.31	95.86	95.62	95.57	94.45	97.28	96.70	96.74	97.04
Gorontalo	94.84	93.26	95.53	95.85	95.82	95.35	97.24	95.72	95.97	96.53
Sulawesi Barat	96.75	96.65	97.84	97.65	97.92	96.65	96.67	96.79	96.84	98.55

Lampiran 4. Persentase Inflasi di Indonesia

Inflasi Indonesia	%
2010	2.72
2011	3.13
2012	3.61
2013	3.02
2014	3.35
2015	8.36
2016	8.38
2017	4.30
2018	3.79
2019	6.96